



**PEMERINTAH
KOTA KENDARI**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari



2022

BKAD KOTA KENDARI

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No 8 Kota Kendari
Sulawesi Tenggara Telp. (0401) 323722



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2021 memuat capaian indikator sasaran atau capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta capaian indikator kinerja akuntabilitas Keuangan tahun anggaran 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana pertanggungjawaban yang dibuat setelah tahun anggaran berakhir yang memuat tentang informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten (stakeholder) dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan.

LAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sekaligus memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Khususnya untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Tentu saja laporan akuntabilitas kinerja ini baik dari segi teknis penyusunan maupun materi masih jauh dari harapan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan demi penyempurnaan kedepan.

Kendari, Januari 2023

ny **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** ✓
KOTA KENDARI

Dr. FARIDA AGUSTINA M, S.E.M.Si,

Pembina Tk. I Gol. IV/b

NIP. 19710802 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2022.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana di amanahkan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari dan dijabarkan melalui Peraturan Walikota Kendari Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari yaitu :

A. Kedudukan

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- c. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD
- d. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Pengendalian pelaksanaan APBD
- f. Pelaksanaan Penatausahaan, system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- g. Pelaksanaan kebijakan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
- h. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

BKAD Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Daerah Kota Kendari periode 2019 – 2022 telah merumuskan

dan menetapkan menetapkan tujuan “Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi”

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2022 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2023, yaitu :

Tujuan	Sasaran
1. Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, melalui Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) juga telah disusun Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolak ukur pengukuran capaian kinerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya dituangkan melalui Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja merupakan tekad janji Rencana Kerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah, dalam hal ini adalah kesepakatan antara Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dengan Kepala Daerah Walikota Kendari.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHITSAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Dasar Hukum	25
1.5 Sistematika	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Rencana Strategis	28
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	33
2.3 Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2 Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN - LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasarannya.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penyusunan LAKIP tahun Anggaran 2022 ini juga merupakan tindak lanjut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari TAP MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan kebijakan tersebut diatas, setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah kearah pelaksanaan dan pengembangan dari system kebijakan dalam rangka mewujudkan good governance (Pemerintahan yang Baik). Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (BKAD) sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Walikota Kendari.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban BKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 2018 s.d 2022 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2022 .

Berdasarkan latar belakang ini, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (BKAD) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Kendari berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari tahun 2022 adalah media pertanggungjawaban yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku OPD dan SKPKD Pemerintah Kota Kendari untuk periode tahun 2022. Dalam Laporan Akuntabilitas

ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2018-2022.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Tujuan dari penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja BKAD Kota Kendari yang terukur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya selama tahun anggaran 2022.
2. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan Kelemahan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif ditahun mendatang.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kendari dan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Serta Peraturan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari



Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur teknis Pemerintah Kota Kendari di bidang Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.3.1 Kedudukan, Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kendari dan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari serta Peraturan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur teknis Pemerintah Kota Kendari di bidang Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, berikut ini diuraikan sebagai berikut :

A. Kedudukan

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas dan Fungsi



Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
3. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD
4. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Pengendalian pelaksanaan APBD
6. Pelaksanaan Penatausahaan, system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
7. Pelaksanaan kebijakan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
8. Penatausahaan Barang Milik Daerah
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki struktur organisasi jabatan, Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Kepala Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan membina bawahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset berbasis akrual serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi OPD.

Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang yakni Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Kepala Bidang Aset.

B. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya maka seorang Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran berbasis akrual
2. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai
3. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan
4. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5. Penyusunan standar operasional prosedur
6. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
7. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan seorang pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub Bagian Keuangan serta seorang pejabat fungsional Perencana Koordinator Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan program anggaran, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan. Selain itu dijabarkan pula tugas pokok sebagai berikut:

- Pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk penyusunan rencana program dan anggaran berbasis akrual
- Penyusunan rencana kerja dan strategis lingkup badan
- Penyusunan rencana aksi
- Penyusunan identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian
- Penyusunan LAKIP
- Penyusunan RKA/RKA Perubahan lingkup badan
- Penyusunan standar operasional prosedur badan
- Pelaksaaan monitoring dan evaluasi kegiatan
- Pelaporan keuangan menggunakan sistem informasi manajemen daerah berbasis akrual
- Penyelenggaraan penatausahaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan. Selain itu dijabarkan pula tugas pokok sebagai berikut:

- Pengumpulan bahan dan pengelolaan data kegiatan pelaporan keuangan berbasis akrual
- Pelaksaaan administrasi keuangan dan gaji
- Pelaksaaan verifikasi dan pembukuan akuntansi berbasis akrual
- Pelaksaaan urusan rutin perbendaharaan, gaji pegawai dan pembuatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan dan melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Selain Tugas Pokok diatas juga melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksaaan surat menyurat dan kearsipan
- Penyelenggaraan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai
- Pelaksanaan kerumahtanggan, perlengkapan dan keprotokolan
- Pelaksaaan peningkatan kinerja, disiplin dan perjanjian kinerja pegawai
- Penyusuna RKBMD dan RKPBMMD lingkup badan
- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan keamanan kantor
- Pelaksanaan ketatatlaksanaan BMD pengguna barang
- Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program teknis penyusunan usulan anggaran satuan kerja perangkat daerah berbasis akrual. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap kepala Badan.

Selain tugas-tugas sebagaimana di atas, Kepala bidang anggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, pedoman dan birnbingan teknis APBD berbasis akrual
2. Perumusan pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBD serta petunjuk teknis di bidang anggaran

3. Pengoordinasian dan penyusunan KUA/Perubahan KUA dan Penyusunan PPAS/Perubahan PPAS
4. Penyusunan Rancangan APBD, Rencana Perubahan APBD dan anggaran pembiayaan daerah berbasis akrual
5. Pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD
6. Pengesahan DPA/DPPA-SKPD perangkat daerah
7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub Anggaran I, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub Anggaran II dan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub Anggaran III.

a. Sub. Bidang Anggaran I bertugas melaksanakan :

- Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah
- Penyusunan prioritas plafon anggaran sementara dan perubahan prioritas plafon anggaran
- Penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada dinas daerah
- Analisa perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai
- Penghimpunan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada dinas daerah
- Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada dinas daerah
- Pelaksanaan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan

- Penyusunan dan penyampaian laporan program kegiatan operasional anggaran I secara berkala
- Penyusunan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sub. Bidang Anggaran II bertugas melaksanakan :

- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan
- Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Inspektorat, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada Inspektorat, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja
- Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Inspektorat, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja
- Penyiapan bahan penyusunan anggaran pembiayaan daerah
- Penyusunan laporan program dan kegiatan operasional anggaran II secara berkala.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Sub. Bidang Anggaran III bertugas melaksanakan :

- Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan
- Penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan

- Pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan
- Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan
- Penyiapan bahan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan
- Penyusunan laporan program kegiatan operasional anggaran III secara berkala
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program teknis Perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Selain tugas-tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan, pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan daerah
2. Penyiapan anggaran kas
3. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas
4. Pengoordinasian dan pengendalian penempatan keuangan daerah, pengelolaan, penatausahaan investasi dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
5. Pengelolaan utang, piutang dan melakukan penagihan piutang daerah
6. Pelaksanaan fungsi administrasi BUD/Kuasa BUD

7. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga
8. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan
9. Pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya
10. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan perbendaharaan
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas perbendaharaan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah dibantu oleh tiga orang Pejabat Fungsional yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub bidang Perbendaharaan I, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub. Bidang Perbendaharaan II dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub. Bidang Kas Daerah.

a. Sub. Bidang Perbendaharaan I bertugas melaksanakan :

- Pelaksanaan register penerimaan dokumen atas SPM belanja Dinas dan Sekretariat DPRD
- Pelaksanaan pengendalian atas anggaran dan meneliti dokumen SPM Dinas dan Sekretariat DPRD
- Peneliti kesesuaian pembebanan belanja dalam APBD
- Pengendalian dan penatausahaan belanja gaji pada Dinas dan Sekretariat DPRD
- Penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji pada Dinas dan Sekretariat DPRD
- Pengoordinasian dengan Lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Dinas dan Sekretariat DPRD

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub. Bidang Perbendaharaan II bertugas melaksanakan :

- Pelaksanaan register penerimaan dokumen atas SPM belanja Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Kecamatan
- Pelaksanaan pengendalian atas anggaran dan meneliti dokumen SPM Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Kecamatan
- Penelitian kesesuaian pembebanan belanja dalam APBD
- Pengendalian dan penatausahaan belanja gaji pada Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Kecamatan
- Penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji pada Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Kecamatan
- Pengoordinasian dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Kecamatan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Sub. Bidang Kas Daerah bertugas melaksanakan :

- Penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah
- Penyiapan SPD untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas
- Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D
- Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas
- Penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
- Pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga

- Pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas
- Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas
- Penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas
- Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas
- Pelaksanaan analisis pemanfaatan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah
- Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah
- Penyusunan dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program teknis pengelolaan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Pelaporan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual
2. Perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis di Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi dan penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi informasi akuntansi
6. Pelaksanaan pembinaan teknis sistem akuntansi keuangan daerah
7. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan
9. Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) keuangan dan barang milik daerah
10. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terjait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang akuntansi dan pelaporan dibantu oleh tiga orang Pejabat Fungsional yaitu ; 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub bidang Akuntansi Penerimaan, 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub bidang Akuntansi Pengeluaran, 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan.

a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan bertugas melaksanakan :

- Penyusunan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis akuntansi penerimaan
- Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
- Pelaksanaan kebijakan akuntansi penerimaan
- Pelaksanaan rekonsiliasi sistem akuntansi penerimaan SKPD dengan sistem akuntansi penerimaan SKPKD
- Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi informasi akuntansi penerimaan
- Penyiapan bahan laporan akuntansi penerimaan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran bertugas melaksanakan :

- Penyusunan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis Akuntansi Pengeluaran
- Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
- Pelaksanaan kebijakan Akuntansi Pengeluaran
- Pelaksanaan rekonsiliasi sistem Akuntansi Pengeluaran SKPD dengan sistem akuntansi pengeluaran SKPKD
- Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi informasi akuntansi pengeluaran
- Penyiapan bahan laporan akuntansi pengeluaran untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan bertugas melaksanakan :

- Penyusunan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Pelaksanaan dan evaluasi SPJ serta Laporan Keuangan SKPD/SKPKD
- Pengendalian Laporan Pertanggungjawaban tingkat SKPD
- Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan prognosis
- Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

F. Bidang Aset

Bidang Aset bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program teknis pengelolaan aset berbasis akrual, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang aset juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan aset daerah berbasis akrual
2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pengelolaan aset daerah
3. Penyiapan penyusunan dan penganalisaan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
4. Penyusunan standar harga
5. Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah
6. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
7. Penyusunan dan penyampaian laporan barang milik daerah
8. Pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah
9. Penyusunan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah
10. Penyusunan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota dan/atau DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku
11. Pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan penilaian barang daerah serta barang lainnya dari perolehan yang sah
12. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang Aset dibantu oleh tiga orang Pejabat Fungsional yaitu ; 1) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub bidang perencanaan Aset, 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub bidang Penatausahaan dan pelaporan aset, 3) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub bidang tata kelola aset.

a. Sub Bidang Perencanaan Aset melaksanakan tugas :

- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
- Penyiapan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD)
- Penyiapan bahan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah
- Penyiapan bahan dan penyusunan dokumen standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar biaya dan standar biaya umum
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Penatausahaan Dan Pelaporan Aset melaksanakan tugas :

- Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah
- Penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah
- Pelaksanaan dan memproses penghapusan barang milik daerah
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyiapan bahan penilaian barang milik daerah
- Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
- Penyusunan dan penyampaian laporan program kegiatan operasional penatausahaan dan pelaporan secara berkala
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Tata Kelola Aset melaksanakan tugas :

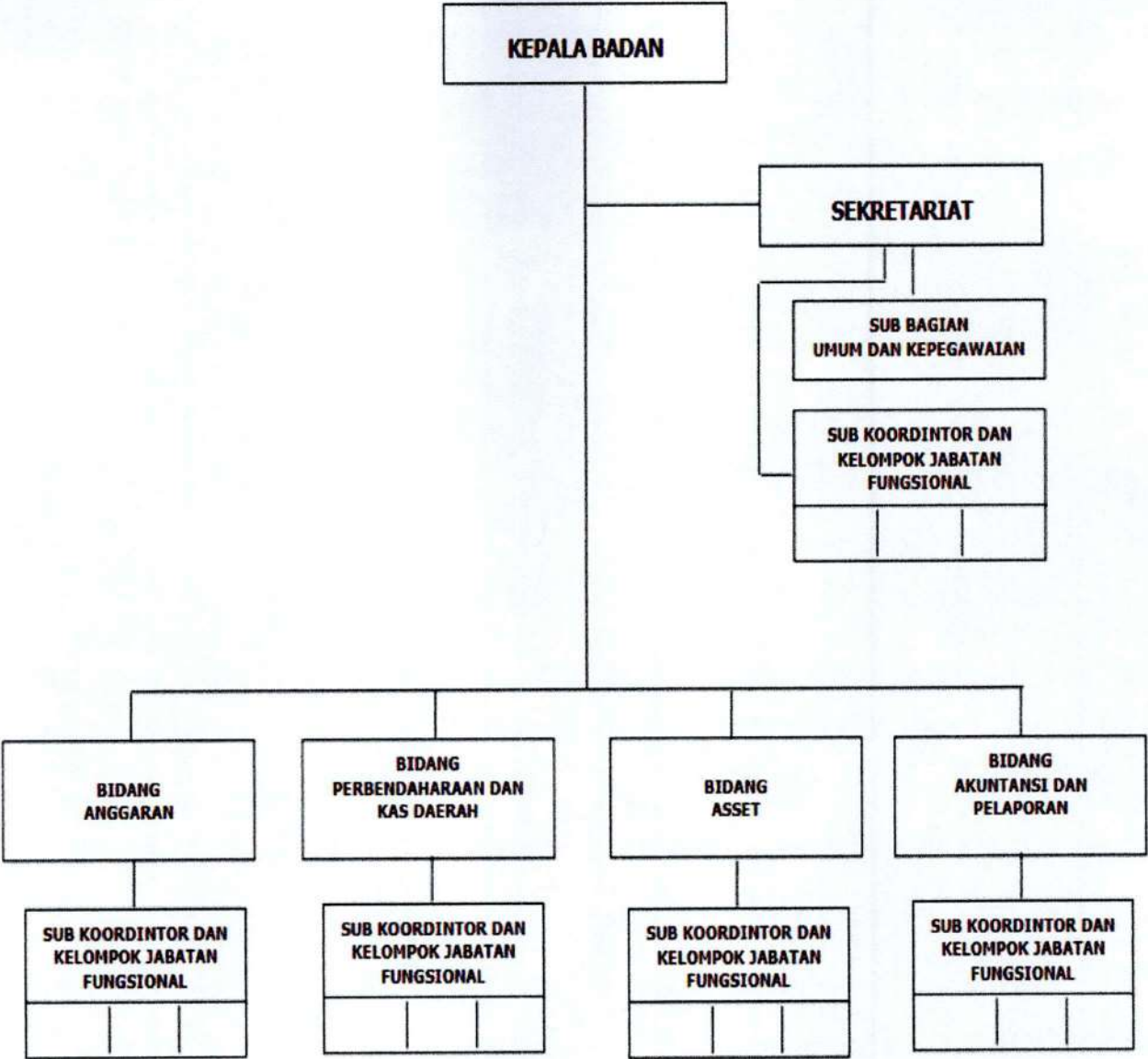
- Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah
- Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah
- Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris
- Pelaksanaan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindatanganan barang milik daerah



- Penyusunan dan penyampaian laporan program kegiatan operasional pemanfaatan dan pengamanan aset secara berkala
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI**



1.3.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari memiliki penunjang operasional berupa sumber daya berupa Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari memiliki Pegawai dari eselon II sampai pada staf dan tenaga kontrak termasuk sopir tercatat melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pertanggal 31 Desember 2022 berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) orang. Adapun uraian secara rinci Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota kendari digambarkan melalui Tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah menurut Jabatan dan Kepangkatan

No	Jab. Struktural/ Tenaga Honorer	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml Orang
1	Kepala Badan	Pembina, TK. I Gol. IV/c	1
2	Sekretaris	Pembina, TK. I Gol. IV/a	1
3	Kepala Bidang	Pembina, Gol. IV/a	2
	Kepala Bidang	Penata Tk. I, Gol. III/d	2
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I, Gol. III/d	1
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Penata Tk. I, Gol. III/d	7
	Ahli Muda	Penata Tk. I, Gol. III/c	3
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk. I, Gol. III/d	2
		Penata Tk. I, Gol. III/c	1
7	Perencana Ahli Muda	Penata Tk. I, Gol. III/c	1
8	Staf PNS	Penata Tk. I, Gol. III/d	18
		Penata, Gol. III/c	14
		Penata Muda Tk. I, Gol III/b	15
		Penata Muda, Gol. III/a	18
		Pengatur Tk. I, Gol. II/d	4
		Pengatur, Gol. II/c	2
		Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	1
9	Staf Honorer	Honorer	59
J U M L A H			152

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 1.2

Sumber Daya Aparatur BKAD Menurut Komposisi Pegawai

NO	JAB. STRUKTURAL	JML ORANG
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	93
2.	Non Pegawai Negeri Sipil (Honoror/Kontrak)	59
J U M L A H		152

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 1.3
 Sumber Daya Aparatur PNS dan Honoror BKAD Menurut Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	JML. ORANG
1	Laki – Laki	63
2	Perempuan	89
J U M L A H		152

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 1.4
 Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah menurut Jabatan

NO	Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional	Jabatan	JML ORANG
1.	Kepala Badan	Jabatan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris	Jabatan Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Jabatan Administrator	4
4.	Kepala Sub Bagian	Jabatan Pengawas	1
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Jabatan Fungsional Tertentu	10
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Fungsional Tertentu	3
7.	Perencana Ahli Muda	Jabatan Fungsional Tertentu	1
J U M L A H			21

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 1.5
Sumber Daya Aparatur PNS BKAD Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JML. ORANG
1	S.3	1
2	S.2	15
3	S.1/D4	61
4	D3/Sederajat	6
5	SMA/Sederajat	10
J U M L A H		93

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 1.6
Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil BKAD
menurut Diklat Penjenjangan

NO.	DIKLAT PENJENJANGAN	JML. ORANG
1	DIKLAT PIM II	-
2	DIKLAT PIM III	2
3	DIKLAT PIM IV	8
J U M L A H		10

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Kesiapan dari sisi SDM yang ada saat ini memang masih jauh dari apa yang menjadi harapan, namun demikian kedepan menjadi salah satu prioritas perekrutan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki terutama dibidang pengelolaan keuangan daerah dan menguasai komputerisasi baik sebagai tenaga teknis, tenaga operator maupun sebagai desain guna terlaksananya pengelolaan keuangan yang lebih Profesional, Transparan dan Akuntabel.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari saat ini memiliki Sumber Daya Aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai Alumni yang ada, akan tetapi dengan dinamika dan perkembangan pembangunan yang terus meningkat memerlukan penyesuaian-penyesuaian untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga terus diperlukan berbagai macam disiplin ilmu yang ada.

B. Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana

Sumber daya Aset/Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sampai dengan tahun 2022 masih jauh dari cukup dengan kondisi fisik yang tidak seratus persen optimal dalam pengoperasiannya disebabkan beberapa faktor antara lain umur barang, sehingga kedepan perlu penambahan guna menunjang tugas-tugas sehari-hari dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum Sumber daya Aset/Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sampai dengan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.7
Sumber daya Aset Kendaraan Dinas/Operasional

NO.	NAMA BARANG	TOTAL UNIT	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	KENDARAAN RODA EMPAT	8	8		
2.	SEPEDA MOTOR	33	33		
JUMLAH TOTAL		41	41		

Sumber : KIB BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 1.8
Sumber daya Aset Peralatan Kantor

NO.	NAMA BARANG	TOTAL UNIT	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	AC / PENDINGIN UDARA	35	35		
2	TV / MONITOR / ALAT PEMADAM KEBAKARAN / WHITE BOARD / ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	18	18		
3	PERALATAN AUDIO / SOUND SYSTEM	21	21		
4	LEMARI	16	16		
5	KAMERA / CCTV / HANDY CAM	18	18		
6	KURSI KERJA / SOFA	166	166		
7	HANDY TALK (HT) / GPS / ALAT UKUR	16	16		
8	PROYEKTOR / SCANNER	15	15		
9	MEJA KERJA	61	61		
10	MESIN KETIK / MESIN ABSENSI	3	3		
11	PAPAN PENGUMUMAN (PLANG	720	720		

	ASET)				
12	PERALATAN JARINGAN LAINNYA	9	9		
13	EXHAUSE / FAN	6	6		
14	BRANKAS / KOTAK PENYIMPANAN	2	2		
15	SERVER	8	8		
16	KOMPUTER PC	102	102		
17	LAPTOP / NOTEBOOK	56	56		
18	PRINTER	125	125		
19	UPS (UNINTEMUPTIBLE POWER SUPLAY)	15	15		
JUMLAH TOTAL		1412	1412		

Sumber : KIB BKAD Kota Kendari Tahun 2022

Tabel 1.9
Sumber Daya Aset Lainnya berupa Sistem Informasi Manajemen/Aplikasi

No.	Uraian	Volume/Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1 Paket	-	-
2.	Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis GIS (SIMSETGIS)	1 Paket	-	-
3.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Pengarsipan SP2D	1 Paket	-	-
4.	OS Mesin Antrian	1 Paket	-	-
5.	SIMPEL ALIR	1 Paket	-	-
6.	E-Office	1 Paket	-	-

Sumber : KIB BKAD Kota Kendari Tahun 2022

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2022 didasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- 2) Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Mengurai Tentang hal yang mendasari kebijakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta maksud dan tujuan penyusunan laporan. Pada Bab ini juga diuraikan gambaran umum yang berkaitan dengan komposisi maupun penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi OPD serta dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengambilan kebijakan OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang muatan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan aset daerah kota kendari menyangkut Tujuan dan sasaran yang dilakukan Badan Keuangan dan aset daerah kota

kendari terkait dengan perencanaan kinerja tahun 2022 dan penetapan kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini terdiri dari Pengukuran capaian kinerja organisasi serta Realisasi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan dan menjalankan organisasi. untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama;
2. Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

BAB IV PENUTUP

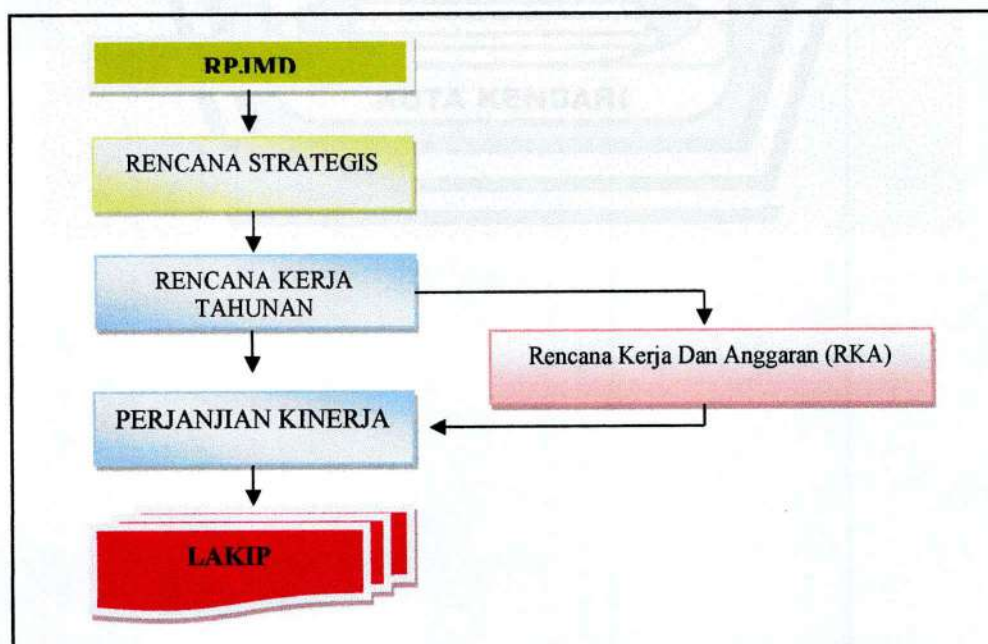
Bab ini berisi uraian kesimpulan atas capaian organisasi yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan aset daerah kota Kendari tahun 2022.

BAB II

PERENCANA KINERJA

Dalam rangka pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Kinerja;
- Capaian Kinerja



Gambar 2 Bagan Dokumen dalam SAKIP

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan pondasi/dasar dalam melaksanakan segala bentuk tindakan untuk menjalankan organisasi. Perencanaan Kinerja mencakup Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek.

Dalam pelaksanaan suatu organisasi perencanaan dimulai dari tahap penyusunan Rencana Strategis yang disingkat dengan RENSTRA, Renstra merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, selanjutnya penjabaran Renstra dilanjutkan melalui penyusunan Rencana Kerja yang disingkat RENJA, Renja merupakan penjabaran dari renstra terhadap capaian organisasi yang akan dilaksanakan setiap tahun atau pelaksanaan organisasi dalam periode satu tahun.

2.1 Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, suatu Perencanaan Strategis terdapat tujuan organisasi yang merupakan cerminan arah kinerja dalam pencapaian Visi misi Daerah dalam suatu periode. Tujuan, Strategi dan indikator capaian kinerja OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Tujuan Jangka Menengah Renstra BKAD Kota Kendari Periode Tahun 2018 s.d 2022.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sebuah instansi/Organisasi Perangkat Daerah ataupun unit kerja mempunyai maksud dan tujuan masing-masing, oleh karena itu Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan agar pengelolaan Keuangan daerah Kota Kendari ditangani oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah profesional dalam pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi pengelolaan aset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari yang diamanahkan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan administrasi asset daerah menyusun tujuan dan arah sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana kerja jangka menengah berdasarkan misi pertama pemerintah kota kendari yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat”

Dalam Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari tahun 2018-2022 telah disebutkan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi kota kendari tujuan tersebut merupakan target yang akan dijabarkan melalui strategi dan arah kebijakan yang melahirkan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Kendari pada Renstra OPD untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan

Dengan memahami definisi tersebut maka BKAD selaku OPD yang juga selaku SKPKD dan Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai suatu Tujuan yaitu :

“Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi”

2.1.2 Sasaran Jangka Menengah Renstra BKAD Kota Kendari Periode Tahun 2018 s.d 2022

Disadari bersama bahwa sebuah instansi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun unit kerja mempunyai maksud dan tujuan masing-masing, oleh karena itu Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan agar pengelolaan Keuangan daerah Kota Kendari ditangani oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah profesional dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Tujuan dan sasaran jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota kendari berdasarkan isu-isu strategis yang merupakan penjabaran dari aksi ataupun tindakan misi BKAD sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Sasaran adalah kondisi ideal yang ingin dicapai suatu Organisasi atau Lembaga Baik Pemerintah maupun Non Pemerintah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari selaku Organisasi Perangkat Daerah memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu ***Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi***

Adapun Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbingkai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018 samai dengan 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Opini BPK Atas Hasil Pemeriksaan LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.3 Strategi, Kebijakan dan Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Kendari

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif. Dengan kata lain guna mencapai sasaran kondisi lingkungan yang dinamis, perlu diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan antara lain Peningkatan sumber daya aparatur serta melakukan Pendataan dan pengelolaan keuangan secara sistematis dan berkelanjutan dengan berbasis pada manajemen administrasi Pengelolaan Keuangan maupun Aset Daerah.

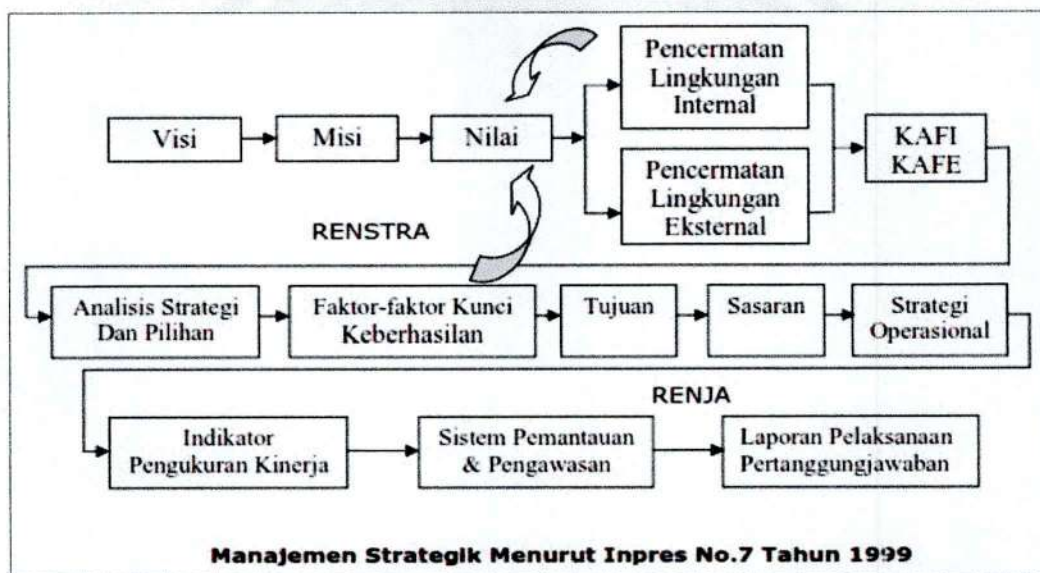
a) Strategi

Berdasarkan Dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari telah dimuat tindakan yang dapat dijadikan strategi dalam mengatasi dan meningkatkan

faktor-faktor internal maupun eksternal yaitu Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

b) Kebijakan

Kebijakan mensinergikan lingkungan strategis Faktor Internal dan Faktor Eksternal dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan *leverage* sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:



Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Kendari sebagaimana telah dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BKAD Tahun 2018-2022 tentang arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan yaitu:

1. Pengendalian pengelolaan Keuangan dengan sistem berbasis teknologi
2. Meningkatkan pengelolaan dan penataan aset daerah

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2022. selanjutnya Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa *output* maupun *Outcome*. Adapun Target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2022.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama satu tahun termuat dalam Perjanjian Kinerja dan Menjadi Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2.2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad janji Rencana Kerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah, dalam hal ini adalah kesepakatan antara Kepala OPD (Pengguna Anggaran) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dengan

Kepala Daerah Walikota Kendari, antara kepala bidang (PPTK) dengan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh OPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program dan kegiatan serta rencana capaiannya yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari **Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022.**

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan/kemajuan kinerja organisasi penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP)

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Selanjutnya secara rinci perjanjian kinerja BKAD Kota Kendari Tahun Anggaran 2022

dapat dilihat pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini.

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2022 BKAD Kota Kendri

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2022
Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	1. Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD 2021	WTP
		2. Capaian Penetapan APBD	Tepat Waktu
		3. Persentase Belanja Pendidikan	25,00
		4. Persentase Belanja Kesehatan	12,15
		5. Persentase luas lahan milik daerah yang bersertifikat	19,50
		6. Persentase Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	100,00
		7. Persentase Aset Yang Termanfaatkan secara Baik	97,15
		8. Persentase capaian realisasi rencana Aset/Kebutuhan Barang Milik Daerah	80,00
		9. Presentase SILPA	0,50

2.2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Program Kegiatan Tahun 2022

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan Indikator Kinerja maka disusunlah Rencana Kerja Program dan Kegiatan sebagai sarana pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari yang dijabarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan dan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Belanja Tahun 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.157.956.722
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.974.701
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.518.765.984
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	466.712.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.230.132.720
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	789.960.711
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.749.117
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.661.489
B.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	36.498.645.847
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.911.769.460
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.402.666.620
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.706.983.620
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	31.044.771.635
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	432.454.512
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.005.962.235
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.005.962.235
JUMLAH ANGGARAN BELANJA		67.662.564.804

Sumber : DPA Perubahan BKAD Tahun Anggaran 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BKAD. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

Akuntabilitas kinerja merupakan Pengukuran Capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

Pengukuran Capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari pada tahun 2022 diperoleh melalui analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2022, dengan proses analisis pengukuran, yaitu sebagai berikut :

- ❖ Membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2022;

- ❖ Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2021);
- ❖ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Pencapaian Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi, Perhitungan presentase, memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut;

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Sedangkan untuk kondisi dengan Capaian Kinerja lebih besar dibandingkan dengan Rencana Kinerja menunjukkan negatif maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- **85 – 100** = **Sangat Baik/Sangat Berhasil**
- **70 – 85** = **Baik/ Berhasil**
- **50 – 70** = **Cukup/Cukup Berhasil**
- **00 – 50** = **Kurang/Kurang Berhasil**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Kendari Tahun 2022

Pengukuran atas capaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Kendari Tahun 2022 sebagaimana termuat pada Bab II, dapat di jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota
Kendari Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Opini BPK Atas Hasil Pemeriksaan LKPD	WTP	WTP	100,00

Berdasarkan table 3.1 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja atas Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Kendari Tahun 2022 memperoleh capaian 100,00 yang memiliki Predikat “Sangat Baik” hal ini di buktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Republik Indonesia Nomor **23.A/LHP/XIX.KDR/05/2021** Tanggal **19 Mei 2021** bahwa pemerintah Kota Kendari memperoleh Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kendari Tahun 2021 dengan Predikat “**Wajar Tanpa Pengecualian**”

3.1.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2021 di tuangkan pada table-tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama BKAD
Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Nilai Capaian	Predikat
Memantapkan kemampuan keuangan	Meningkatnya kemampuan pengelolaan	1. Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD 2019	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Nilai Capaian	Predikat
daerah berbasis teknologi informasi	keuangan dan aset daerah serta sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	2. Capaian Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Sangat Baik
		3. Persentase Belanja Pendidikan	25,00	24,53	98,12	Sangat Baik
		4. Persentase Belanja Kesehatan	12,15	17,88	100,00	Sangat Baik
		5.. Persentase luas lahan milik daerah yang bersertifikat	19,50	20,44	100,00	Sangat Baik
		6. Persentase Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	100,00	92,59	92.59	Sangat Baik
		7. Persentase Aset Yang Termanfaatkan secara Baik	97,15	100,00	100,00	Sangat Baik
		8. Persentase capaian realisasi rencana Kebutuhan Barang Milik	80,00	100,00	100,00	Sangat Baik
		9. Presentase SILPA	0,50	-3,69	0	Kurang

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat terlihat bahwa gambaran Capaian Kinerja Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari yang berjumlah 9 (sembilan) indikator dengan capaian nilai kinerja yaitu 8 (delapan) indikator memiliki capaian nilai dengan kategori “Sangat Baik”, sebanyak 1 (satu) indikator memiliki capaian nilai dengan kategori “Kurang”.

Capaian-Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2022 meliputi pengukuran dengan kategori penilaian yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, serta Capaian Kinerja lebih besar dibandingkan dengan Rencana Kinerja menunjukkan capaian yang positif.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari tahun 2022 yang dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Opini Terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Realisasi Kinerja	Predikat
Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD 2020	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

Sesuai Target Kinerja yang di perjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 adalah LHP-LKPD Tahun anggaran 2020 dengan hasil WTP, capaian kinerja tersebut memperoleh nilai 100% berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor **23.A/LHP/XIX.KDR/05/2021** Tanggal **19 Mei 2021** bahwa pemerintah Kota Kendari memperoleh Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kendari Tahun 2020 dengan Predikat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan didasarkan penjelasan kriteria dalam penetapan Opini BPK-RI.

2. Indikator Capaian Penetapan APBD

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Nilai Capaian	Predikat
Capaian Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Penetapan APBD dengan target tepat Waktu memiliki capaian kinerja “Sangat Baik” hal ini dibuktikan dengan jadwal terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Nomor : **5 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022** tidak melebihi dari Jadwal yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 84 Tahun 2022** Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yaitu Paling lambat akhir Desember (31 Desember 2022). Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 dapat mempertahankan predikat Sangat Baik dari tahun 2021.

3. Persentase Belanja Pendidikan

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Capaian Kinerja	Nilai
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	25,00%	24,53%	98,12	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

Pengukuran Indikator ini memiliki capaian “Sangat Baik”, hal ini dinyatakan dengan angka realisasi terhadap persentase Belanja pendidikan yang di alokasikan pada penganggaran tahun 2022 sebesar **24,53%** atau sebesar **Rp. 366.780.499.310,00** dari Jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar **Rp. 1.495.176.479.725,00**. Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 dapat mempertahankan predikat Sangat Baik dari tahun 2021.

4. Persentase Belanja Kesehatan

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Nilai Capaian	Predikat
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	12,15%	17,88%	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

Pengukuran Indikator ini memiliki capaian “Sangat Baik”, hal ini dinyatakan dengan angka realisasi terhadap persentase Belanja Kesehatan yang di alokasikan pada penganggaran tahun 2023 sebesar **17,88%** atau sebesar **Rp. 267.479.481.745,00** dari Jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar **Rp. 1.495.176.479.725,00**. Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 dapat mempertahankan predikat Sangat Baik dari tahun 2021.

5. Persentase luas lahan milik daerah yang bersertifikat

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Nilai Capaian	Predikat
Persentase luas lahan milik daerah yang bersertifikat	19,10%	20,44%	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik

Pengukuran Indikator ini memiliki capaian dengan predikat “Sangat Baik”, hal ini dinyatakan dengan angka realisasi terhadap persentase luas lahan yang bersertifikat tahun 2022 sebesar **20,44%** atau seluas **2.185.410,08 M2** dari total Luas Lahan Pemerintah Kota Kendari seluas **10.693.374,50 M2**. Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan memperoleh predikat Sangat Baik.

6. Persentase Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Nilai Capaian	Predikat
Persentase Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	100,00%	92,59%	85,46	Sangat Baik	85,46	Sangat Baik

Pengukuran Indikator ini memiliki capaian dengan predikat “Baik”, hal ini dinyatakan dengan angka realisasi terhadap persentase Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa jangka waktu penerbitan SP2D sejak diterimanya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPKD tidak melebihi batas waktu 2 kali 24 jam (2 hari Kerja) pada tahun 2022 sebesar **92,59%** atau sejumlah **13.111 Dokumen** dari total SP2D yang terbit sejumlah **14.159 Dokumen**. Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan memperoleh predikat Sangat Baik.

7. Persentase Aset Yang Termanfaatkan secara Baik

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Nilai Capaian	Predikat
Persentase Aset Perangkat Daerah Yang Termanfaatkan secara Baik	97,15%	100,00%	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

Pengukuran Indikator ini memiliki capaian dengan predikat “Sangat Baik”, hal ini dinyatakan dengan angka realisasi tahun 2022 sebesar **100,00%** atau sejumlah **1.558 Unit** dari total **1.558 Unit** Aset yang termuat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2022. Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 dapat mempertahankan predikat Sangat Baik dari tahun 2021.

8. Persentase capaian realisasi rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Nilai Capaian	Predikat
Persentase capaian realisasi rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	80,00%	100,00%	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik

Pengukuran Indikator ini memiliki capaian dengan predikat “Sangat Baik”, hal ini dinyatakan dengan angka realisasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari tahun 2022 sebesar **100,00%** yang teralokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2022. Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 dapat mempertahankan predikat Sangat Baik dari tahun 2021.

9. Persentase SiLPA terhadap APBD

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022				TAHUN 2021	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian	Predikat	Nilai Capaian	Predikat
Persentase SiLPA Terhadap APBD	0,54%	3,69%	0	Kurang	< 0%	Kurang

Pengukuran Indikator ini memiliki capaian dengan predikat “Kurang”, hal ini dinyatakan dengan angka Persentase nilai SiLPA Kota Kendari tahun 2022 terhadap APBD sebesar **3,69%** atau sebesar **Rp. 74.218.957.592,00** dari Total Target Belanja APBD sebesar **Rp. 2.010.333.406.850,00** Berdasarkan tabel Indikator Capaian tersebut diketahui bahwa tidak terjadi perubahan dari capaian kinerja tahun 2021 dengan memperoleh predikat yang masih Kurang.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan tabel 3.2 Pengukuran Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama BKAD Tahun 2022 terdapat Peningkatan terhadap capaian kinerja atas perbandingan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021

Tabel 3.3
Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Realisasi Kinerja Utama
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Tahun 2021		Keterangan
	Capaian Kinerja	Predikat	Capaian Kinerja	Predikat	
1. Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD 202	WTP	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	Tetap
2. Capaian Penetapan APBD	Tepat Waktu	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	Tetap
3. Persentase Belanja Pendidikan	24,53	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	Tetap
4. Persentase Belanja Kesehatan	17,88	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	Tetap
5.. Persentase luas lahan milik daerah yang bersertifikat	20,44	Sangat Baik	99,48	Sangat Baik	Tetap
6. Persentase Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	92,59	Sangat Baik	85,46	Baik	Meningkat
7. Persentase Aset Yang Termanfaatkan secara Baik	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	Tetap
8. Persentase capaian realisasi rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100,00	Sangat Baik	100,00	Sangat Baik	Tetap
9. Presentase SILPA Terhadap APBD	-3,69	Kurang	< 0	Kurang	Tetap

3.2 Realisasi Anggaran

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Berdasarkan sumber anggaran tersebut, maka setiap OPD memiliki belanja guna menjalankan organisasi, Adapun Uraian secara menyeluruh terhadap target anggaran dan realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel-Tabel berikut :

Tabel 3.4
Rincian Anggaran Dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.157.956.722	28.551.483.197	97,92
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.974.701	114.403.630	93,03
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.324.090	7.273.120	99,30
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.850.380	53.680.140	99,68
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.850.380	41.547.350	83,34
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.992.050	2.980.070	99,60
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.992.050	2.975.450	99,45
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.992.050	2.983.230	99,71
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.973.701	2.964.270	99,68
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.518.765.984	25.137.891.117	98,51
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.226.039.114	24.847.987.697	98,50
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.140.020	7.125.840	99,80
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	285.586.850	282.777.580	99,02
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	466.712.000	399.167.500	85,53
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.180.000	63.000.000	99,72
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	403.532.000	336.167.500	83,31
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.230.132.720	1.185.693.203	96,39
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.299.500	10.016.000	97,25
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.051.770	70.045.300	99,99
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.242.130	51.241.970	99,99
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	107.835.000	107.795.500	99,96
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	741.386.000	697.926.723	94,14
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	249.318.320	248.667.710	99,74
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	789.960.711	717.161.507	90,78
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.070.760	42.900.000	73,88
2	Pengadaan Mebel	13.717.550	13.717.047	99,99
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	659.407.500	602.366.010	91,35
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.764.901	58.178.450	99,00
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.749.117	251.785.908	98,45
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.749.117	210.590.908	99,92
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000	41.195.000	91,54

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.661.489	745.380.332	96,34
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.707.910	478.885.352	94,70
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.643.329	21.619.000	99,89
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	29.934.000	99,78
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.318.750	30.306.650	99,96
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.420.000	147.327.000	99,94
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.571.500	37.308.330	96,73

Tabel 3.5
Rincian Anggaran Dan Realisasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	36.498.645.847	22.334.753.335	61,19
H.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.911.769.460	1.832.911.250	95,88
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.260.180	28.757.700	95,03
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.470.050	39.606.800	95,51
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	74.411.440	74.114.150	99,60
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	33.040.800	30.952.800	93,68
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	14.913.000	14.913.000	100,00
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34.602.250	32.742.900	94,63
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	997.120.330	931.671.000	93,44
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	685.951.410	680.152.900	99,15



NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.402.666.620	1.391.141.646	99,18
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	576.447.600	575.010.500	99,75
2	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	45.006.170	39.124.246	86,93
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	781.212.850	777.006.900	99,46
J.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.706.983.620	1.608.410.710	94,23
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	206.936.640	201.360.330	97,31
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	37.680.450	37.489.900	99,49
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	421.407.320	383.336.260	90,97
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	901.423.950	900.069.060	99,85
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	51.620.000	-	0,00
6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	22.620.710	21.747.660	96,14
7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65.294.550	64.407.500	98,64
K.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	31.044.771.635	17.166.317.385	55,30
1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	79.294.380	45.998.430	58,01
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.965.477.255	17.120.318.955	55,29
L.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	432.454.512	335.972.344	77,69
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	142.078.512	119.692.000	84,24
2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	290.376.000	216.280.344	74,48

Tabel 3.6
Rincian Anggaran Dan Realisasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun
Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.005.962.235	1.758.392.890	87,66
M.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.005.962.235	1.758.392.890	87,66
1	Penyusunan Standar Harga	165.444.780	149.927.400	90,62
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.252.590,00	11.208.000	99,60
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.771.250	19.730.000	99,79
4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	33.382.600	33.047.520	99,00
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	470.596.500	470.466.000	99,97
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	227.425.750	224.216.000	98,59
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	327.455.345	173.765.000	53,07
8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	112.066.670	49.385.600	44,07
9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	313.486.750	312.452.300	99,67
10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	325.080.000	314.195.070	96,65

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu fokus pelaksanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah telah melaksanakan berbagai program/kegiatan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2022 yang Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp 67.662.564.804** yang terealisasi **Rp 52.644.629.422** atau **77,80%** dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp 59.021.315.344** terealisasi sebesar **Rp 46.251.051.928** atau **78,36%**.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp 1.001.231.799** terealisasi sebesar **Rp 771.161.507** atau **77,02%**.
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp 7.538.282.661** terealisasi sebesar **Rp 5.520.680.987** atau **73,24%**.
- d. Belanja Transfer sebesar **Rp 101.735.000** terealisasi sebesar **Rp 101.735.000** atau **100%**.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Keuangan Sub Kegiatan dengan angka capaian Kurang dari 90%
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.850.380	41.547.350	83,34
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	403.532.000	336.167.500	83,31
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.070.760	42.900.000	73,88
D	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	45.006.170	39.124.246	86,93
E	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	51.620.000	-	0,00
F	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
6	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	79.294.380	45.998.430	58,01
7	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.965.477.255	17.120.318.955	55,29
G	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
8	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	142.078.512	119.692.000	84,24
9	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	290.376.000	216.280.344	74,48
H	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
10	Pengamanan Barang Milik Daerah	327.455.345	173.765.000	53,07
11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	112.066.670	49.385.600	44,07



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari menjelaskan tentang pengukuran kinerja instansi terhadap capaian indikator kinerja serta pertanggung jawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 mencakup;

- A. Pengukuran indikator kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan persentase capaian kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari tahun 2022
- B. Pengukuran Akuntabilitas Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022
- C. Capaian terhadap pengukuran kinerja Pengukuran yang termuat dalam indikator kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan persentase capaian kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Capaian terhadap pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari yang berjumlah **9 (Sembilan)** indikator dengan capaian nilai kinerja yaitu **8 (Delapan)** indikator memiliki capaian nilai dengan kategori “**Sangat Baik**”, **1 (satu)** indikator memiliki capaian nilai dengan kategori “**Kurang**”.
 2. Capaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2021 2022 yang Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp 67.662.564.804** yang terealisasi **Rp 52.644.629.422** atau **77,80%** dengan rincian belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi sebesar **Rp 59.021.315.344** terealisasi sebesar **Rp 46.251.051.928** atau **78,36%**.
 - b. Belanja Modal sebesar **Rp 1.001.231.799** terealisasi sebesar **Rp 771.161.507** atau **77,02%**.
 - c. Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp 7.538.282.661** terealisasi sebesar **Rp 5.520.680.987** atau **73,24%**.

- d. Belanja Transfer sebesar **Rp 101.735.000** terealisasi sebesar **Rp 101.735.000** atau **100%**.
3. Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kinerja baik kegiatan, sasaran maupun tujuan, tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 yang kami susun yang selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Kendari dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Kendari, Januari 2023

**Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kendari**



Dr. FARIDA AGUSTINA M, S.E.M.Si,

Pembina Tk. I Gol. IV/b

NIP. 19710802 200212 2 002



LAMPIRAN

DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA KENDARI YANG SUDAH BERSERTIPIKAT

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
1	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000002	4.000,00	2005	Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai		21.05.09.10.4.00025	Pasar Punggolaka	Pembelian	Sekretariat Daerah
2	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000005	5.154,00	2015	Jl. Bunggasi	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.12.02.3.00009	Pasar Andounuhu	Hibah	Sekretariat Daerah
3	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000006	245,00	2015	Jl. Gunung Jati Kel. Gunung Jati Kec. Kendari	Hak Pakai	4/12/1993	21.01.03.02.3.00001	Sekretariat Daerah	Hibah	Sekretariat Daerah
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	4.921,00	2005	Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai		21.05.09.05.4.00051	Tanah Kantor	Pembelian	Sekretariat Daerah
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000003	694,50	2018	Jl. Mayjend Sutoyo	Hak Pakai		21.05.05.10.4.00025	Tanah Kantor Lurah Watu2	Hibah	Sekretariat Daerah
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000004	25.000,00	2010	Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu	Hak Pakai		21.05.10.12.4.00015	Tanah Cadangan	Pembelian	Sekretariat Daerah
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000005	525,00	2010	Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli	Hak Pakai	12/31/2010	21.05.06.06.4.00029	Pasar Lapulu	Pembelian	Sekretariat Daerah
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000006	1.200,00	2018	Jl. Bunga Seroja	Hak Pakai		21.05.05.13.4.00002	gedung kantor	Hibah	Sekretariat Daerah
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000016	1.000,00	2010	Kelurahan Bonggoeja Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai		21.05.07.02.4.00009	Tanah SD	Pembelian	Sekretariat Daerah
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000019	1.526,00	2015	Jl. Durian	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.12.02.3.00010	Sekretariat Daerah	Hibah	Sekretariat Daerah
11	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	15.000,00	2005	Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari	Hak Pakai	8/10/2005	P 00005	Tanah bangunan SMP Negeri 18	Pembelian	Sekretariat Daerah
12	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	5.275,00	2005	Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia	Hak Pakai		21.05.03.02.4.00050	SDN 21 Poasia	Pembelian	Sekretariat Daerah
13	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000003	1.608,00	2005	Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga	Hak Pakai	5/20/2011	P 00009	Tanah SDN 7 Baruga	Pembelian	Sekretariat Daerah
14	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000004	1.248,00	2011	Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	12/8/2004	P 00002	Tanah SDN 4 Kendari	Pembelian	Sekretariat Daerah
15	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000005	2.374,00	2011	Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	2/5/2006	P 00023	Tanah SDN 11 Mandonga	Pembelian	Sekretariat Daerah
16	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000008	7.500,00	2013	Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli	Hak Pakai		21.05.06.17.4.00002	Tanah Sekolah	Pembelian	Sekretariat Daerah
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	01.01.01.04.026	000005	470,00	2010	Kelurahan Benuanirae Kecamatan Abeli	Hak Pakai		21.05.06.15.4.00002	Sanggar PKK	Pembelian	Sekretariat Daerah
18	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000003	8.096,00	2009	Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia	Hak Pakai		21.05.03.11.4.00015	Tanah Cadangan	Pembelian	Sekretariat Daerah
19	Tanah Lapangan Sepak Bola	01.01.03.01.005	000001	9.645,00	2012	Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai		21.05.09.05.4.00050	Lapangan Bola	Pembelian	Sekretariat Daerah
20	Tanah Lapangan Sepak Bola	01.01.03.01.005	000002	13.568,00	2015	Jl. Kancil Kel. Andounuhu	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.12.02.3.00012	Lapangan Sepak Bola	Hibah	Sekretariat Daerah
21	Tanah Lapangan Lainnya	01.01.03.01.025	000001	10.000,00	2011	Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli	Hak Pakai		21.05.06.01.4.00012	Tanah Lapangan	Pembelian	Sekretariat Daerah
22	Tanah Untuk Makam Umum	01.01.03.12.005	000003	4.866,00	2011	Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli	Hak Pakai		21.05.06.01.4.00011	Tempat Pemakaman Umum	Pembelian	Sekretariat Daerah

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
23	Tanah Untuk Makam Umum	01.01.03.12.005	000006	6.263,00	2012	Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli	Hak Pakai		21.05.06.17.4.00003	Tempat Pemakaman Umum	Pembelian	Sekretariat Daerah
24	Tanah Lapangan Taman lainnya	01.01.03.13.003	000003	272,00	2008	Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari	Hak Pakai	5/10/2011	P 00005	Taman	Pembelian	Sekretariat Daerah
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	2.344,00	2015	Jl. Ir. Soekarno	Hak Pakai	4/12/1993	21.01.03.04.3.00141	Kantor Camat Kendari	Hibah	Kecamatan Kendari
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	371,00	2013	Jl. Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	5/20/2011	P 00001	Kantor Lurah Jati Mekar	Pembelian	Kelurahan Jati Mekar
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	228,00	2015	Jl. Ir. Soekarno	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.03.04.3.00143	Kantor Lurah Kandai	Hibah	Kelurahan Kandai
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	458,00	2015	Jl. Gunung Jati	Hak Pakai	4/12/1993	21.01.03.02.3.00002	Kantor Lurah Gunung Jati	Hibah	Kelurahan Gunung Jati
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	122,00	2013	Jl.Nangka, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	6/30/2003	P 00001	Kantor Lurah Kampung Salo	Pembelian	Kelurahan Kampung Salo
30	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	293,00	2013	Jl. Poros Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	8/5/2003	P 00001	Kantor Lurah Mangga Dua	Pembelian	Kelurahan Mangga Dua
31	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	400,00	2013	Jl. Mangga Dua, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	6/30/2003	P 00045	Kantor Lurah Kessilampe	Pembelian	Kelurahan Kessilampe
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	675,00	2013	Jl. RE.Martadinata, Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	6/30/2003	P 00001	Kantor Lurah Mata	Pembelian	Kelurahan Mata
33	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	391,00	2013	Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	11/6/2004	P 00001	Kantor Lurah Purirano	Pembelian	Kelurahan Purirano
34	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	408,00	2013	Jl.Imam Bonjol .Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	12/6/2004	P 00002	Kantor Lurah Alolama	Pembelian	Kelurahan Alolama
35	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	515,00	2013	Jl.Imam Bonjol, Kelurahan Angilowu, Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	12/16/2004	P 00001	Kantor Lurah Angilowu	Pembelian	Kelurahan Anggilowu
36	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	587,00	2013	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	6/2/2003	P 00001	Kantor Lurah Wawombalata	Pembelian	Kelurahan Wawombalata
37	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	605,00	2013	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	6/2/2003	P 00001	Kantor Lurah Labibia	Pembelian	Kelurahan Labibia
38	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.01.01.002	000001	1.444,00	2013	Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia	Hak Pakai	12/29/1992	P 00006	Rumah Jabatan Camat Poasia	Pembelian	Kecamatan Poasia
39	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	3.496,00	2015	Kel. Andounuhu	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.12.02.3.00013	Kantor Kelurahan Andounuhu	Hibah	Kelurahan Andounuhu
40	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	2.250,00	2015	Kel. Andounuhu	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.12.05.3.00011	Kantor Kelurahan Andounuhu	Hibah	Kelurahan Andounuhu
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	287,00	2013	Jl.Sisingamaharaja ,Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia	Hak Pakai	2/14/2000	P 00006	Kantor Lurah Anggoeya	Pembelian	Kelurahan Anggoeya
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	536,00	2013	Jl. Panglima Polim, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia	Hak Pakai	6/30/2003	P 00006	Kantor Lurah Rahandouna	Pembelian	Kelurahan Rahandouna
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	630,00	2013	Jl. Mayjen Katamso ,Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga	Hak Pakai	6/2/2003	P 00001	Kantor Lurah Baruga	Pembelian	Kelurahan Baruga
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.932,00	2013	Jl.Balai Kelurahan, Kelurahan Lepo-lepo	Hak Pakai	6/15/2006	P 00012	Kantor Lurah Lepo-lepo	Pembelian	Kelurahan Lepo-Lepo
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	800,00	2013	Jl. BTN Terombua, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga	Hak Pakai	1/5/2006	P 00001	Kantor Lurah Watubangga	Pembelian	Kelurahan Watubangga
46	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.170,00	1990	JL. Bung Tomo, Kel. Punggaloa Kec. Kendari Barat	Hak Pakai	6/30/2003	P 00144	Kantor Camat Kendari Barat	Pembelian	Kecamatan Kendari Barat
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	344,00	2015	Jl. Bunga Dahlia Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat	Hak Pakai	12/29/1992	21.01.03.03.3.00213	Kantor Kelurahan Kemaraya	Hibah	Kelurahan Kemaraya

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIFIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
48	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	321,00	2013	Jl. Gagak No.2, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/5/2003	P 00002	Kantor Lurah Punggaloba	Pembelian	Kelurahan Punggaloba
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	485,00	2013	Jl. Balanak, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/5/2003	P 00107	Kantor Lurah Sodoha	Pembelian	Kelurahan Sodohoa
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	255,00	2013	Jl.Sungai ,Konaweha No.2, Kelurahan Dapu-Dapura ,Kecamatan Kendari	Hak Pakai	8/5/2003	P 00002	Kantor Lurah Dapu-Dapura	Pembelian	Kelurahan Dapu-Dapura
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	471,00	2013	Jl.Dr.Moh.Hatta, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	11/6/2004	P 00002	Kantor Lurah Sanua	Pembelian	Kelurahan Sanua
52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.139,00	2000	Jl. Poros Moramo Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	11/6/2004	P 00003	Kantor Camat Abeli	Pembelian	Kecamatan Abeli
53	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	929,00	2013	Jl. Wedahu. Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	11/6/2004	P.00002	Kantor Lurah abeli II	Pembelian	Kelurahan Abeli
54	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	1.007,00	2013	Jl. Wedahu Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	2/14/2000	P.00002	Kantor Lurah Abeli I	Pembelian	Kelurahan Abeli
55	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000003	1.100,00	2013	Jl. wedahu Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	2/14/2000	P.00001	Kantor Lurah Abeli III	Pembelian	Kelurahan Abeli
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	905,00	2013	Jl. Poros Lapulu, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	2/14/2000	P 00028	Kantor Lurah Lapulu	Pembelian	Kelurahan Lapulu
57	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	921,00	2013	Jl. Pemuda, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	5/11/2011	P 00001	Kantor Lurah Puday	Pembelian	Kelurahan Pudai
58	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.074,00	1998	RT.03/RW/02 kel. Talia,Kec.Abeli	Hak Pakai	7/3/2000	P 00001	Kantor Lurah Talia	Pembelian	Kelurahan Talia
59	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	871,00	2013	Jl. Tri Dharma, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	7/3/2000	P 00002	Kantor Lurah Poasia	Pembelian	Kelurahan Poasia
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	162,00	2013	Jl. Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia	Hak Pakai	11/28/2004	P 00014	Kantor Lurah Kadia	Pembelian	Kelurahan Kadia
61	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	527,00	2013	Jl.Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia	Hak Pakai	12/28/2004	P 00015	Kantor Lurah Kadia	Pembelian	Kelurahan Kadia
62	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000003	185,00	2015	Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.09.07.3.00229	Kantor Kelurahan Kadia	Hibah	Kelurahan Kadia
63	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	547,00	2013	Jl. Sao-sao, Kelurahan Bende ,Kecamatan Kadia	Hak Pakai	6/2/2003	P 00009	Kantor Lurah Bende	Pembelian	Kelurahan Bende
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	678,00	2013	Jl. Haeba Dalam, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua	Hak Pakai	7/4/2000	P 00572	Kantor Lurah Wua-wua	Pembelian	Kelurahan Wua-wua
65	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	286,00	2013	Jl.Bahagia, Keluraha Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua	Hak Pakai	2/14/2000	P 00006	Kantor Lurah Bonggoeya	Pembelian	Kelurahan Bonggoeya
66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.323,00	2013	Jl.Prof.Rauf Tarimanan, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu	Hak Pakai	6/30/2003	P 00028	Kantor Lurah Kambu	Pembelian	Kelurahan Kambu
67	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.574,00	2013	Jl. Orinunggu, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu	Hak Pakai	2/14/2000	P 00001	Kantor Lurah Mokoau	Pembelian	Kelurahan Mokoau
68	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	01.01.01.01.003	000001	2.747,00	2015	Jl. Prof. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu	Hak Pakai	12/29/1992	21.01.09.04.3.00028	Rumah Jabatan Camat/Sekcam Puuwatu	Hibah	Kecamatan Puuwatu
69	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	5.908,00	2015	Jl. Prof.Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu	Hak Pakai	12/29/1992	21.01.09.04.3.00027	Kantor Kecamatan Puuwatu	Hibah	Kecamatan Puuwatu
70	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.022,00	2013	Jl. Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	2/14/2000	P 00001	Kantor Watulondo	Pembelian	Kelurahan Watulondo
71	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	580,00	2013	Jl. R.Suprpto, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	1/5/2006	P 00022	Kantor Lurah Tobuha	Pembelian	Kelurahan Tobuha
72	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	506,00	2013	Jl. Cendrawasih, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	6/30/2003	P 00001	Kantor Lurah Nambo	Pembelian	Kelurahan Nambo

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	704,00	2013	Jl. Balai Kelurahan, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	2/14/2000	P 00001	Kantor Lurah Tobimeita	Pembelian	Kelurahan Tobimeita
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	790,00	2013	Jl. Cut Nyak Dhien, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	8/5/2003	P 00001	Kantor Lurah Sambuli	Pembelian	Kelurahan Sambuli
75	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000476	4.950,00	2013	Jl. Malik Raya I Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00209	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000504	26.013,00	2013	Jl. Malik Raya Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00208	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000505	2.358,00	2013	Jl. Malik Raya II Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00210	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000506	2.799,00	2013	Jl. Malik Raya III Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00215	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
79	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000507	2.727,00	2013	Jl. Malik Raya IV Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00212	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
80	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000508	1.467,00	2013	Jl. Malik Raya V Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00211	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000509	1.467,00	2013	Jl. Malik Raya VI Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00218	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
82	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000510	2.511,00	2013	Jl. Malik Raya VII Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00216	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
83	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000511	3.402,00	2013	Jl. Malik Raya VIII Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00217	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
84	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000512	2.340,00	2013	Jl. Malik Raya IX Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00214	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000513	1.278,00	2013	Jl. Malik Raya X Kecamatan Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00213	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	01.01.03.09.003	000001	19.500,00	2013	Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	5/7/2013	P 00001	Tempat Pembuangan Tinja	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87	Tanah Untuk Makam Umum	01.01.03.12.005	000001	356.988,00	2000	Jl. Pekuburan Kel. Punggolaka	Hak Pakai	10/24/1998	0001	Tempat Pemakaman Umum	Pembelian	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
88	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	4.640,00	1979	Jl. Bunggasi Kel. Rahandouna, Kecamatan Poasia	Hak Pakai	5/30/2011	00008	Puskesmas Poasia	Pembelian	Puskesmas Poasia
89	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	528,00	2000	Jl. Kasuari BTN Kendari permai Blok F Kelurahan Mokoau, Kecamatan	Hak Pakai	4/11/2011	00001	Puskesmas Mokoau	Pembelian	Puskesmas Poasia
90	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	382,00	1997	Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia	Hak Pakai	2/14/2000	00007	Pustu Anggoeya	Pembelian	Puskesmas Poasia
91	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	309,00	1984	Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	2/14/2000	00029	Pustu Lapulu	Pembelian	Puskesmas Abeli
92	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	1.045,00	1988	Kelurahan Sambuli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	8/5/2003	00002	Pustu Sambuli	Pembelian	Puskesmas Abeli
93	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	255,00	1988	Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	6/30/2003	00002	Puskesmas Nambo	Pembelian	Puskesmas Abeli
94	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	340,00	1988	Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	4/8/2011	00003	Pustu Talia	Pembelian	Puskesmas Abeli
95	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	1.643,00	1988	Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	5/11/2011	00001	Pustu Bungkutoko	Pembelian	Puskesmas Abeli
96	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	556,00	2002	Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	4/11/2011	00001	Pustu Benua Nirae	Pembelian	Puskesmas Abeli
97	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	2.848,00	2004	Jl. Sewanggi No 2 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	5/30/2011	00004	Puskesmas Abeli	Pembelian	Puskesmas Abeli

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
98	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	257,00	2013	Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Abeli	Hak Pakai	6/6/2011	P 00001	Pustu Tondonggeu	Pembelian	Puskesmas Abeli
99	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	1.410,00	2000	Jl. Laremba Lorong RCTI Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia	Hak Pakai	6/2/2003	00011	Puskesmas Mekar	Pembelian	Puskesmas Mekar
100	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	187,00	2013	Jl. Anawai, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua	Hak Pakai	6/8/2000	P 00573	Puskesmas Wua-wua	Pembelian	Puskesmas Wua-Wua
101	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	1.150,00	1990	Jl. Cemara No 10 Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari	Hak Pakai	4/8/2011	00010	Puskesmas Mata	Pembelian	Puskesmas Mata
102	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	666,00	1990	Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	7/28/1997	21.05.01.05.4.00039	Pustu Kampung Butung	Pembelian	Puskesmas Mata
103	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	463,00	1990	Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	8/5/2003	00002	Pustu Mangga Dua	Pembelian	Puskesmas Mata
104	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	408,00	1990	Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/5/2003	00001	Puskesmas Benu-benu Lama	Pembelian	Puskesmas Benu-Benu
105	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	1.287,00	2013	Jl. Ir. H. Alala, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	4/8/2011	P 00004	Puskesmas Benua-Benua	Pembelian	Puskesmas Benu-Benua
106	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	898,00	2000	Jl. Mayjen S Parman, Kompleks Kampus Lama Unhalu Kelurahan	Hak Pakai	5/10/2011	00236	Puskesmas Kemaraya	Pembelian	Puskesmas Kemaraya
107	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	241,00	1992	Jl. Rumah Sakit Jiwa Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	4/11/2011	00001	Pustu Tobuuha	Pembelian	Puskesmas Puwatu
108	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	6.659,00	1990	Jl. Prof M Yamin No 64 Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	5/30/2011	00047	Puskesmas Puuwatu	Pembelian	Puskesmas Puwatu
109	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	627,00	1998	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	5/12/2011	00002	Pustu Alolama	Hibah	Puskesmas Labibia
110	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	573,00	1998	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	4/8/2011	00003	Puskesmas Labibia	Pembelian	Puskesmas Labibia
111	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	533,00	1990	Jl. Lababa No 4 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia	Hak Pakai	6/2/2003	00010	Puskesmas Perumnas	Pembelian	Puskesmas Perumnas
112	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	1.104,00	2000	Jl. Jatiraya Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia	Hak Pakai	5/10/2011	00011	Puskesmas Jati raya	Pembelian	Puskesmas Perumnas
113	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.638,00	2000	Jl. Christina M. Tiahau No.117 KDI Kelurahan Wundudopi Kecamatan	Hak Pakai	5/10/2011	00013	Puskesmas Lepo-lepo	Pembelian	Puskesmas Lepo-Lepo
114	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	1.006,00	2013	Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga	Hak Pakai	4/8/2011	P 00008	Pustu Nanga-Nanga	Pembelian	Puskesmas Lepo-Lepo
115	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	706,00	2015	Jl. Ir. Soekarno Kel. Kandai Kec. Kendari	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.03.04.3.00142	TK. Melati Mekar	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
116	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	2.801,00	2015	Kel. Andounuhu	Hak Pakai	6/3/1993	21.01.12.02.3.00008	TK. Andounuhu	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
117	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.437,00	1980	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	1/5/2006	P 00003	SDN 12 Mandonga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
118	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.794,00	1982	Jl. Poros Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari	Hak Pakai	10/4/2004	P 00002	SDN 14 Kendari	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
119	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.908,00	1983	Jl. Pulau Pandan Kelurahan Poasia Kecamatan Abeli	Hak Pakai	11/6/2004	P 00003	SDN 05 Abeli	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
120	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.686,00	1986	Jl. Patimura No.37 Kelurahan Puuwatu kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	12/6/2004	P 00043	SDN 04 Mandonga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
121	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	7.828,00	1988	Jl. Anoa, Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia	Hak Pakai	6/9/2011	P 00009	SDN 03 Poasia	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
122	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	2.351,00	1989	Jl. Tungga Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wau	Hak Pakai	7/6/2006	P 00577	SDN 10 Baruga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
123	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.466,00	1990	Jl. Ir. Soekarno No.117 Kelurahan Dapu dapura Kecamatan Kendari	Hak Pakai	4/8/2011	P 00004	SDN 01 Kendari Barat	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
124	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	2.520,00	1990	Jl. Jeruk, Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari	Hak Pakai	4/14/2005	P 00003	SDN 13 Kendari	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
125	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	13.749,00	1993	Jl. Kapten Pierre Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga	Hak Pakai	1/19/1993	P 00008	SDN 18 Baruga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
126	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.370,00	1994	Jl. Cendrawasih Kelurahan Nambo Kecamatan Abeli	Hak Pakai	2/15/2006	P 00003	SDN 04 Abeli	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
127	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.903,00	1997	Jl. Ruruhi, Kelurahan Anggoya Kecamatan Poasia	Hak Pakai	1/5/2006	P 00009	SDN 12 Poasia	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
128	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	793,00	2000	Jl. Bunga Matahari No.43 H Kelurahan Kemaraya Kecamatan	Hak Pakai	12/6/2004	P 00289	SDN 20 Kendari Barat	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
129	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	1.985,00	2000	Jl. Bunga Matahari No. 43 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	6/15/2006	P 00233	SDN 11 Kendari Barat	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
130	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000002	1.993,00	2006	Jl. Imam Bonjol No. 50 Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	1/5/2006	P 00002	SDN 17 Mandonga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
131	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.692,00	1967	Jl. Pemuda No.2 Kelurahan Puday Kecamatan Abeli	Hak Pakai	11/6/2004	P 00001	SDN 06 Abeli	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
132	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.427,00	1969	Jl. Imam Bonjol No. 132 Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	6/15/2006	P 00002	SDN 15 Mandonga	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
133	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	5.498,00	1973	Jl. Bunggasi, Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia	Hak Pakai	6/9/2011	P 00002	SDN 01 Poasia	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
134	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.684,00	1980	Jl. Pemuda Kelurahan Puday Kecamatan Abeli	Hak Pakai	11/9/2004	P 00002	SDN 10 Abeli	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
135	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	5.318,00	1982	Jl. Banteng Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia	Hak Pakai	2/15/2006	P 00007	SDN 07 Poasia	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
136	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	2.125,00	1983	Jl. Poros Moramo Kelurahan Sambuli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	7/6/2006	P 00005	SDN 02 Abeli	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
137	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.608,00	1984	Jl. K.S Tugun Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga	Hak Pakai	5/20/2011	P 00009	SDN 07 Baruga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
138	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	20.000,00	1985	Jl. Imam Bonjol No.1 Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	7/20/1989	21.05.02.15.4.00007	SMPN 08 Kendari	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
139	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	2.066,00	1986	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	2/15/2006	P 00004	SDN 03 Mandonga	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
140	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	2.294,00	1988	Jl. Poros Kelurahan Sambuli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	7/6/2006	P 00004	SDN 12 Abeli	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
141	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.289,00	1990	Jl. RE Martadinata Kelurahan Kassilampe Kecamatan Kendari	Hak Pakai	8/12/2004	P 00001	SDN 09 Kendari	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
142	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	798,00	1995	Jl. Cendrawasih Kelurahan Nambo Kecamatan Abeli	Hak Pakai	6/15/2006	P 00004	SDN 18 Abeli	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
143	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	679,00	1996	Jl. Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari	Hak Pakai	10/4/2004	P 00001	SDN 10 Kendari	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
144	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	2.282,00	1996	Jl. Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari	Hak Pakai	4/14/2005	P 00001	SDN 11 Kendari	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
145	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.711,00	1996	Jl. Wijaya Kusuma No.47 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	12/6/2004	P 00230	SDN 18 Kendari Barat	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
146	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.343,00	2000	Jl. Sultan Hasanuddin No.102 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari	Hak Pakai	12/6/2004	P 00062	SDN 17 Kendari Barat	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
147	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.720,00	2000	Lr. Bangau Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	6/15/2006	P 00004	SDN 19 Kendari Barat	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIFIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER									
								TANGGAL	NOMOR			
148	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.222,00	2000	Jl. Bunga Mataharat No.43 E Kel. Lahundape Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	6/15/2006	P 00234	SDN 16 Kendari Barat	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
149	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.468,00	2000	Jl. RA. Kartini No.78,Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari	Hak Pakai	12/8/2004	P 00001	SDN 12 Kendari	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
150	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	-	2000	Jl. Dr. Hatta No.41 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	6/3/1999	P 00104	SDN 04 Kendari Barat	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
151	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.996,00	2000	Jl. Mangga Dua No.56 Kendari Kelurahan Mangga Dua Kecamatan	Hak Pakai	12/28/2012	P 00001	SDN 15 Kendari	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
152	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.421,00	2000	Jl. RA. Kartini, Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari	Hak Pakai	12/28/2012	P 00004	SDN 08 Kendari	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
153	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.401,00	2000	Jl. KH. Dewantara No.26, Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari	Hak Pakai	12/28/2012	P 00157	SDN 06 Kendari	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
154	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.206,00	2000	Jl. Poros Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari	Hak Pakai	12/8/2004	P 00002	SDN 03 Kendari	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
155	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.248,00	2000	Jl. RE. Martadinata No. 4, Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari	Hak Pakai	12/8/2004	P 00002	SDN 04 Kendari	Hibah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
156	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.969,00	2000	Jl. Pulau Pandan Kelurahan Poasia Kecamatan Abeli	Hak Pakai	11/6/2004	P 00004	SDN 17 Abeli	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
157	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	3.140,00	2000	Jl. Poros Moramo Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	4/14/2005	P 00001	SDN 07 Abeli	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
158	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.557,00	2000	Jl. Pinggir Pantai Kelurahan Talia Kecamatan Abeli	Hak Pakai	11/6/2004	P 00002	SDN 08 Abeli	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
159	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.156,00	2000	Jl. D. Panjaitan Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga	Hak Pakai	5/26/2011	P 00001	SDN 19 Baruga	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
160	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	3.729,00	2000	Jl. Sakulau, Kelurahan Mataububu Kecamatan Poasia	Hak Pakai	6/9/2011	P 00001	SDN 14 Poasia	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
161	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	4.145,00	2000	Jl.D. Panjaitan Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga	Hak Pakai	6/9/2011	P 00004	SDN 01 Baruga	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
162	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	2.148,00	2000	Jl. Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Baruga	Hak Pakai	6/9/2011	P 00002	SDN 11 Baruga	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
163	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.853,00	2000	Jl. Tanukila No.19 Kendari Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia	Hak Pakai	12/28/2004	P 00011	SDN 17 Baruga	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
164	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	2.294,00	2000	Jl. Dr. Soetomo No.29 Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	2/15/2006	P 00002	SDN 18 Mandonga	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
165	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	3.118,00	2000	Jl. Ruruhi, Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia	Hak Pakai	2/15/2006	P 00012	SDN 06 Poasia	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
166	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	2.852,00	2000	Jl. Prof. Abdul Rauf Tarimana Kelurahan Kambu Kecamatan Kambo	Hak Pakai	2/15/2006	P 00009	SDN 04 Poasia	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
167	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	2.420,00	2000	Jln. Jambu Putih no. 10 , Kelurahan Anggoya Kecamatan Poasia	Hak Pakai	2/15/2006	P 00011	SDN 05 Poasia	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
168	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.090,00	2000	Jln. Kijang Kmpiks Perumnas Poasia Kelurahan Rahanduna Kecamatan	Hak Pakai	5/12/2011	P 00007	SDN 11 Poasia	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
169	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	5.148,00	2000	Jln. kampung Baru ,kelurahan Andounoho Kecamatan Poasia	Hak Pakai	2/15/2006	P 00001	SDN 08 Poasia	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
170	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	3.087,00	2000	Jln. Kasuari BTN, Kendari Fernal, Kelurahan Padaleu Kecamatan	Hak Pakai	6/9/2011	P 00002	SDN 10 Poasia	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
171	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	2.070,00	2000	Jl. Patimura No.5 Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	5/11/2005	P 00002	SDN 05 Mandonga	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
172	Tanah Bangunan Pendaftaran Dan Lathian	01.01.01.04.002	000001	1.584,00	2000	Jl. Patimura No.50 A, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	12/6/2004	P 00002	SDN 14 Mandonga	Pembelian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
173	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	944,00	2000	Jl. Patimura No.37 Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	12/6/2004	P 00044	SDN 09 Mandonga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
174	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	2.223,00	2013	Jl.Mekar Komp.RCTI ,Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia	Hak Pakai	2/15/2006	P 00016	SDN 16 Baruga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
175	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.208,00	2013	Jl. Jatiraya ,Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia	Hak Pakai	12/28/2004	P 00012	SDN 15 Baruga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
176	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.295,00	2013	Jl. Chaeril Anwar Lrg. Durian Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-	Hak Pakai	12/28/2004	P.00575	SDN 05 Baruga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
177	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	2.496,00	2013	Jl.Bunga Matahari No.02 , Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	6/9/2011	P 00237	SDN 07 Kendari Barat	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
178	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	3.418,00	1990	Jl. Poros Kelurahan Sambuli Kecamatan Abeli	Hak Pakai	7/6/2006	P 00003	SDN 09 Abeli	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
179	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	2.469,00	2000	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	7/6/2006	P 00003	SDN 06 Mandonga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
180	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	2.344,00	2000	Jl. Jambu Putih,Kelurahan Anggoya Kecamatan Poasia	Hak Pakai	2/15/2006	P 00010	SDN 02 Poasia	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
181	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	1.247,00	2000	Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	12/6/2004	P 00061	SDN 15 Kendari Barat	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
182	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000001	2.374,00	1980	Jl. R. Suprpto,No.149 Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	2/15/2006	P 00023	SDN 11 Mandonga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
183	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000001	4.797,00	1983	Jl. Ade Irma Nasution Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga	Hak Pakai	2/15/2006	P 00002	SDN 09 Baruga	Hibah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
184	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000001	1.544,00	2008	Jl.Orinunggu No. 04 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga	Hak Pakai	1/5/2006	P 00001	SDN 08 Baruga	Pembelian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
185	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	3.560,00	2015	Jl. Bunggasi	Hak Pakai	12/29/1992	21.05.03.11.4.00016	Kantor BP4K	Hibah	Dinas Pertanian
186	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	925,00	2015	Jl. Mayjen Soetoyo	Hak Pakai	12/29/1992	21.01.03.09.3.00049	Kantor Ketahanan Pangan	Hibah	Dinas Pangan
187	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000004	4.456,00	2017	Pasar Rakyat Wayong di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia	Hak Pakai	9/23/2009	21.05.08.01.4.00023	Pasar Pondambea	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
188	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000001	1.500,00	2015	Kel. Lalodati Kec. Puuwatu (SDN 23 Mandonga)	Hak Pakai	9/23/2009	21.05.09.14.4.00002	SDN 23 Mandonga	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
189	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000002	2.500,00	2015	Jl. Jambu Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia (SDN 16 Poasia)	Hak Pakai	9/23/2009	21.05.03.03.4.00014	Tanah Sekolah	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
190	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002	000003	240,00	2015	Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian Kelurahan Wua-Wua (SDN 5 Baruga)	Hak Pakai		21.05.07.01.4.00586	SDN 5 Baruga	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
191	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	000001	782,00	2016		Hak Pakai		21.05.08.02.4.00018	Puskesmas Bende	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
192	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000001	1.686,00	2015	Jl. Banda Kel. Watulondo Kec. Puuwatu	Hak Pakai		21.05.09.12.4.00002	Pakan Ternak Unggas	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
193	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	01.01.02.02.002	000002	1.320,00	2015	Jl. Syekh Yusuh, Kel. Korumba Kec. Mandonga	Hak Pakai		21.05.02.13.4.00207	Pengembangan Fasilitas Umum	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
194	Tanah Lapangan Taman lainnya	01.01.03.13.003	000001	38.192,00	2015	Pantai Nambo Kel. Nambo Kec. Abeli	Hak Pakai		21.05.06.10.4.00006	Perluasan Pantai Nambo	Pembelian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
195	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	01.01.03.03.003	000001	124,00	2002	Jl. Khairil Anwar	Hak Pakai	7/19/2003	00032	TPA	Pembelian	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
196	Tanah Jalan			10.320,00	2013	Jl. Sao-sao Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00027	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
197	Tanah Jalan			20.250,00	2013	Jl. Abunawas Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00025	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
198	Tanah Jalan			7.876,00	2013	Jl. Antero Hamra Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00024	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
199	Tanah Jalan			5.408,00	2013	Jl. Kol. Abd. Hamid Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00026	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200	Tanah Jalan			3.329,00	2013	Jl. Rasamala Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00018	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
201	Tanah Jalan			1.091,00	2013	Jl. Rasamala I Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00013	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
202	Tanah Jalan			1.304,00	2013	Jl. Rasamala II Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00014	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
203	Tanah Jalan			1.207,00	2013	Jl. Rasamala III Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00015	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
204	Tanah Jalan			754,00	2013	Jl. Rasamala IV Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00016	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
205	Tanah Jalan			775,00	2013	Jl. Rasamala V Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00022	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
206	Tanah Jalan			1.664,00	2013	Jl. Jati Raya I Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00020	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
207	Tanah Jalan			1.867,00	2013	Jl. Jati Raya II Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00025	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
208	Tanah Jalan			1.115,00	2013	Jl. Jati Raya III Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00023	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
209	Tanah Jalan			236,00	2013	Jl. Jati Raya IV Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00024	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
210	Tanah Jalan			285,00	2013	Jl. Jati Raya V Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00019	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
211	Tanah Jalan			1.251,00	2013	Jl. Jati Raya VI Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021		Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
212	Tanah Jalan			27.740,00	2013	Jl. Budi Utomo Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00025	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
213	Tanah Jalan			69.100,00	2013	Jl. Wayong Kecamatan Wua-wua	Hak Pakai	10/12/2021	00017	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
214	Tanah Jalan			32.930,00	2013	Jl. Laode Hadi Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	10/12/2021	00017	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
215	Tanah Jalan			24.170,00	2013	Jl. Sorumba Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	10/12/2021	00012	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
216	Tanah Jalan			10.860,00	2013	Jl. Ubin Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	10/12/2021	00001	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
217	Tanah Jalan			12.040,00	2013	Jl. KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	10/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
218	Tanah Jalan			921,00	2013	Jl. Durian Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	10/12/2021	00587	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
219	Tanah Jalan			12.830,00	2013	Jl. Sulemandara Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	10/12/2021	00011	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
220	Tanah Jalan			15.670,00	2013	Jl. Sapati Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	10/12/2021	00013	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
221	Tanah Jalan			8.739,00	2013	Jl. Asrama Haji Kecamatan Baruga	Hak Pakai	10/12/2021	00012	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
222	Tanah Jalan			11.900,00	2017	Jalan Masuk SMP 19 Kendari Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00003	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER				TANGGAL	NOMOR			
223	Tanah Jalan			2013	Jl. HE. Mokodompit Kecamatan Kambu	Hak Pakai	10/12/2021	00003	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
224	Tanah Jalan			2013	Jl. Prof. Dr. Raulf Tarimana Kecamatan Kambu	Hak Pakai	10/12/2021	00036	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
225	Tanah Jalan			2013	Jl. S. Soraya/Lumba - Lumba Kecamatan Kambu	Hak Pakai	10/12/2021	00002	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
226	Tanah Jalan			2013	Jl. Malaka Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00055	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
227	Tanah Jalan			2013	Jl. Mangga Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00228	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
228	Tanah Jalan			2013	Jl. Semangka Kecamatan poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00057	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
229	Tanah Jalan			2013	Jl. Nanga - Nanga Tapol Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00030	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
230	Tanah Jalan			2013	Jl. Akasia Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00020	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
231	Tanah Jalan			2013	Jl. Kelapa Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00054	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
232	Tanah Jalan			2013	Jl. Belimbing Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00059	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
233	Tanah Jalan			2013	Jl. Kayu Eha Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00024	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
234	Tanah Jalan			2013	Jl. Kedondong Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021		Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
235	Tanah Jalan			2013	Jl. Kayu Santigi Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00025	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
236	Tanah Jalan			2013	Jl. Kayu Meranti Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00022	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
237	Tanah Jalan			2013	Jl. Sanggia Nguluri Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00019	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
238	Tanah Jalan			2013	Jl. Lababa Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00021	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
239	Tanah Jalan			2013	Jl. Lapato/Sinar Surya Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00007	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
240	Tanah Jalan			2013	Jl. Sanati Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
241	Tanah Jalan			2017	Jalan Masuk Kebun Raya Kendari	Hak Pakai	10/12/2021	00023	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
242	Tanah Jalan			2013	Jl. Saranani Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00221	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
243	Tanah Jalan			2013	Jl. Supu Yusuf Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00023	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
244	Tanah Jalan			2013	Jl. Lasandara Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00228	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
245	Tanah Jalan			2013	Jl. Lasandara I Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00223	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
246	Tanah Jalan			2013	Jl. Lasandara II Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00225	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
247	Tanah Jalan			2013	Jl. Saranani I Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00219	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIFIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER				TANGGAL	NOMOR			
248	Tanah Jalan			2013	Jl. Saranani II Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00220	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
249	Tanah Jalan			2013	Jl. Syech Yusuf Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00222	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250	Tanah Jalan			2013	Jl. Made Sabara II Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00276	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
251	Tanah Jalan			2013	Jl. Tabanungu Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00275	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
252	Tanah Jalan			2013	Jl. Tabanungu I Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00272	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
253	Tanah Jalan			2013	Jl. Laute Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00016	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
254	Tanah Jalan			2013	Jl. Balaikota Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00273	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
255	Tanah Jalan			2013	Jl. Subsidi Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00003	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
256	Tanah Jalan			2017	Jalan Andi Jemma (Sidenreng) Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00227	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
257	Tanah Jalan			2017	Jalan Kolono Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00226	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
258	Tanah Jalan			2013	Jl. Wolter Mongisidi Kecamatan Kendari	Hak Pakai	10/12/2021	00164	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
259	Tanah Jalan			2013	Jl. Kongoosa Kecamatan Kendari	Hak Pakai	10/12/2021	00163	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
260	Tanah Jalan			2013	Jl. Mangga Dua-Mata Kecamatan Kendari	Hak Pakai	10/12/2021	00013	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
261	Tanah Jalan			2013	Jl. Toha Mansur Kecamatan Baruga	Hak Pakai	10/12/2021	00034	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
262	Tanah Jalan			2013	Jl. Siwole Mbatohu Kecamatan Baruga	Hak Pakai	10/12/2021	00012	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
263	Tanah Jalan			2013	Jl. H. Rahman kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	10/12/2021	00005	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
264	Tanah Jalan			2013	Jl. Bunga Seroja Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00003	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
265	Tanah Jalan			2013	Jl. TPA Puuwatu Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	10/12/2021	00052	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
266	Tanah Jalan			2017	Jalan Perum Nelayan Purirano Kecamatan Kendari	Hak Pakai	10/12/2021	00087	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
267	Tanah Jalan			2017	Jalan Bunga Palembang Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00026	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
268	Tanah Jalan			2017	Jalan Bunga Seruni Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00095	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
269	Tanah Jalan			2017	Jalan Bunga Matahari I Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
270	Tanah Jalan			2017	Jalan Bunga Matahari II Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00005	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
271	Tanah Jalan			2017	Jalan Dangga - Budi Utomo Baru Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	10/12/2021	00001	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
272	Tanah Jalan			2017	Jalan Kosgoro Kecamatan Baruga	Hak Pakai	10/12/2021	00029	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
273	Tanah Jalan			4.098,00	2017	Jalan Masuk Lapangan Golf Sanggoleo Kecamatan Baruga	Hak Pakai	10/12/2021	00011	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
274	Tanah Jalan			8.156,00	2013	Jl. Bunga Tanjung Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00027	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
275	Tanah Jalan			12.360,00	2013	Jl. Bunga Kamboja Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00250	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
276	Tanah Jalan			21.550,00	2013	Jl. Brigjen. M. Joenoes Kecamatan Kadia	Hak Pakai	10/12/2021	00022	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
277	Tanah Jalan			16.640,00	2013	Jl. Iwana Kecamatan Baruga	Hak Pakai	10/12/2021	00033	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
278	Tanah Jalan			3.441,00	2013	Jl. Gunung Sirimau Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00005	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
279	Tanah Jalan			13.320,00	2013	Jl. Bintang Laut/Uritas Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00002	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
280	Tanah Jalan			7.427,00	2013	Jl. Tanjung Tiram Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
281	Tanah Jalan			4.176,00	2013	Jl. G. Kabaena Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
282	Tanah Jalan			8.587,00	2013	Jl. G. Todoha Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
283	Tanah Jalan			3.561,00	2013	Jl. Tobimeita I Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00003	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
284	Tanah Jalan			6.637,00	2013	Jl. G. Tangke Limboko Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00001	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285	Tanah Jalan			18.310,00	2013	Jl. T. Toronipa/Maleo Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00003	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
286	Tanah Jalan			11.460,00	2013	Jl. Pulau Bungkutoko Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
287	Tanah Jalan			8.029,00	2017	Jalan Akses Pelabuhan Bungkutoko	Hak Pakai	10/12/2021	00003	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
288	Tanah Jalan			6.898,00	2013	Jl. H. Edi Sabara Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00007	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
289	Tanah Jalan			13.830,00	2013	Jl. Bridjend. ZA. Sugiarto Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00037	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
290	Tanah Jalan			11.970,00	2013	Jl. Buburanda Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00224	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
291	Tanah Jalan			6.177,00	2013	Jl. Gunung Meluhu Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00017	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
292	Tanah Jalan			334,00	2017	Jalan Madusila - Outer Ring Road	Hak Pakai	10/12/2021	00165	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
293	Tanah Jalan			3.702,00	2013	Jl. Ir. H. Alala Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00008	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
294	Tanah Jalan			14.620,00	2013	Jl. Bung Tomo Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00147	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
295	Tanah Jalan			4.552,00	2013	Jl. G. Mekongga Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	10/12/2021	00026	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
296	Tanah Jalan			12.820,00	2017	Jalan Mekar Jaya Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	10/12/2021	00026	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
297	Tanah Jalan			23.050,00	2013	Jl. Taman Suropati Kecamatan Mandonga	Hak Pakai	10/12/2021	00274	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
298	Tanah Jalan			4.373,00	2013	Jl. Bunga Matahari Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	10/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
299	Tanah Jalan			10.710,00	2013	Jl. Madusila Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00058	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
300	Tanah Jalan			15.000,00	2013	Jl. M. Ummirtun Kecamatan Abeli	Hak Pakai	10/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
301	Tanah Bangunan Dermaga			43.670,00	2015	Jl. Madusila Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia	Hak Pakai	10/12/2021	00018	RTH Anggoeya	Pembelian	BKAD Kota Kendari
302	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000017	12.510,00	2013	Jl. Gunung Jati Kecamatan Kendari	Hak Pakai	8/15/2022	00001	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
303	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000123	2.340,00	2013	Jl. Pasar Kota Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00007	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
304	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000132	2.450,00	2013	Jl. Baronang Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00009	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
305	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000135	2.240,00	2013	Jl. Cumi-Cumi Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00008	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
306	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000148	2.286,00	2013	Jl. Bandang Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00606	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
307	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000153	1.206,00	2013	Jl. Elang Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00605	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
308	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000249	968,00	2013	Jl. Kelinci Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00098	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
309	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000253	592,00	2013	Jl. Badak Kecamatan Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00096	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
310	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000273	464,00	2013	Jl. Harimau Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00099	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000276	640,00	2013	Jl. Beruang Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00097	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
312	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000277	1.656,00	2013	Jl. IAIN Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00100	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
313	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000280	848,00	2013	Jl. Singa Kendari Barat	Hak Pakai	8/15/2022	00101	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
314	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000038	2.093,00	2013	Jl. Supu Yusuf II Kecamatan Kadia	Hak Pakai	8/15/2022	00229	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
315	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000044	720,00	2013	Jl. Supu Yusuf III Kecamatan Kadia	Hak Pakai	8/15/2022	00230	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
316	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000048	720,00	2013	Jl. Supu Yusuf IV Kecamatan Kadia	Hak Pakai	8/15/2022	000231	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
317	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000387	2.112,00	2013	Jl. Lompobattang Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00028	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
318	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000390	7.472,00	2013	Jl. P. Kalimantan/Pasir Putih Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00005	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
319	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000414	3.058,00	2013	Jl. P. Kabaena/Banda Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00006	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
320	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000421	9.042,00	2013	Jl. G. Sahari/Laheda Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00029	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
321	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000430	7.469,00	2013	Jl. G. Bawakaraeng Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00030	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
322	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000436	3.582,00	2013	Jl. P. Buton Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00004	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
323	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000445	1.888,00	2013	Jl. G. Baito Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00022	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
324	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000468	11.560,00	2013	Jl. Irian Jaya/BTN BPN Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00054	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
325	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000472	3.312,00	2013	Jl. PDAM Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00004	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
326	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000583	3,91	2017	Jalan Lima Lima Kecamatan Puuwatu	Hak Pakai	8/15/2022	00027	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
327	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000591	1,45	2017	Jalan Tanukila I Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	8/15/2022	00003	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
328	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000592	1,33	2017	Jalan Tanukila II Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	8/15/2022	00002	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
329	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000593	0,91	2017	Jalan Tanukila III Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	8/15/2022	00004	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
330	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000610	-	2017	Jalan Merak Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	8/15/2022	00006	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
331	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000611	0,98	2017	Jalan Hilas Kecamatan Wua-Wua	Hak Pakai	8/15/2022	00005	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
332	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000083	2.163,00	2013	Jl. S. Rawa Aopa/Lr. Damai Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00008	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
333	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000084	2.681,00	2013	Jl. S. Boro-Boro/Lr. Salangga Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00013	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
334	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000087	1.197,00	2013	Jl. S. Lakambula/Lr. Beruang Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00012	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
335	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000090	987,00	2013	Jl. S. Moramo/Lr. Beringin Kecamatan kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00007	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
336	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000094	1.330,00	2013	Jl. S. Anggotawe/Lr. Bintang Kecamatan kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00015	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
337	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000097	2.744,00	2013	Jl. S. Anduna/Lr. Pelangi Kecamatan kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00009	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
338	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000100	1.799,00	2013	Jl. S. Pohara/Lr. Anawai Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00010	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
339	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000114	1.799,00	2013	Jl. S. Lasolo/Lr. Arwana Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00006	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
340	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000116	2.261,00	2013	Jl. Napo Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00021	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
341	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000117	2.268,00	2013	Jl. S. Amesiu/Lr. Kawat Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00014	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
342	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000120	1.211,00	2013	Jl. S. Poleang/Lr. Mata Air I Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00005	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
343	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000320	11.064,00	2013	Jl. BTN Lepo-lepo Indah Kecamatan Baruga	Hak Pakai	8/15/2022	00013	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
344	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000337	2.849,00	2013	Jl. Mata Oleo Kecamatan Baruga	Hak Pakai	8/15/2022	00036	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
345	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000345	6.093,00	2013	Jl. Sultan Qaimuddin Kecamatan Baruga	Hak Pakai	8/15/2022	00035	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
346	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000373	1.974,00	2013	Jl. Depan Polsek Baruga Kecamatan Baruga	Hak Pakai	8/15/2022	00039	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
347	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000375	2.205,00	2013	Jl. Solomo Kecamatan Baruga	Hak Pakai	8/15/2022	00038	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	HAK	SERTIPIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	OPD PENGGUNA
		KODE BARANG	REGISTER					TANGGAL	NOMOR			
348	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000647	-	2017	Jalan Nuri Baruga	Hak Pakai	8/15/2022	00037	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
349	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000092	3.609,00	2013	Jl. Pasaeno II Kecamatan Kadia	Hak Pakai	8/15/2022	00029	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
350	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000095	2.295,00	2013	Jl. Pasaeno III Kecamatan Kadia	Hak Pakai	8/15/2022	00030	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
351	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000073	37,00	2013	Jl. Puskesmas Mata Kecamatan Kendari	Hak Pakai	8/15/2022	00084	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
352	Tanah Untuk Jalan Nasional	01.01.03.07.001	000103	546,00	2013	Jl. S. Kadia/Lr. Perintis Kecamatan Kambu	Hak Pakai	8/15/2022	00011	Jalan	Pembelian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI



DR. Farida Agustina M, SE., M.Si
Pembina Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19710802 200212 2 002



PEMERINTAH KOTA KENDARI
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2022

Provinsi : PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA KENDARI
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
U P B : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	101.760.235.840,00
1	TANAH	91.651.777.350,00
1.01	TANAH	91.651.777.350,00
2	PERALATAN DAN MESIN	8.224.585.568,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.440.465.900,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	156.689.020,00
2.04	ALAT PERTANIAN	20.000.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.636.058.749,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	433.027.201,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	118.461.300,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	3.419.883.398,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.875.693.072,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	25.043.272,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1.850.649.800,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	5.168.850,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	5.168.850,00
5	ASET TETAP LAINNYA	3.011.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	3.011.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.105.150.000,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KOTA KENDARI
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2022

Provinsi : PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA KENDARI
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
U P B : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	1.105.150.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	1.105.150.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00


Kendari, Januari 2023
Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kendari


Dr. FARIDA AGUSTINA M, S.E.M.Si
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 19710802 200212 2 002

**CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN SP2D YANG TERBIT TEPAT WAKTU
PERIODE 31 DESEMBER 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH SP2D TERBIT ≤ 2 HARI	JUMLAH SP2D TERBIT > 2 HARI	TOTAL SP2D	CAPAIAN 2020		NILAI CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6 = (3/5x100%)	6 = (3/5x100%)	6 = (3/5x100%)
1	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	13.111	1.048	14.159	100,00%	92,60%	92,60%

Kendari, Januari 2023

 **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI**



DR. Farida Agustina M, SE., M.Si
Pembina Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19710802 200212 2 002

KOTA KENDARI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01				PELAYANAN UMUM					
01	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	270.440.055.380	211.958.063	0	0	270.652.013.443
01	02	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	156.867.801.831	8.542.961.741	0	0	165.410.763.572
01	03	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.603.285.083	2.184.412.904	0	0	16.787.697.987
01	04	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.321.127.802	276.669.825	0	0	6.597.797.627
01	05	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.755.090.671	8.620.521.281	0	0	31.375.611.952
01	06	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.714.030.608	101.008.601	0	0	4.815.039.209
01	07	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.672.543.170	79.323.046	0	0	4.751.866.216
01	08	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.979.837.793	26.493.710	0	0	4.006.331.503
01	09	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.335.736.955	42.699.716	0	0	3.378.436.671
01	10	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.637.698.041	2.545.679.784	0	0	17.183.377.825
01	11	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.739.465.513	1.100.993.844	0	0	8.840.459.357
01	12	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.930.412.728	33.690.886	0	0	5.964.103.614
01	13	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.545.242.967	3.165.133.500	0	0	12.710.376.467
01	14	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.796.796.220	105.768.478	0	0	4.902.564.698
01	15	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.676.072.734	218.949.372	0	0	5.895.022.106
01	16	2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	60.671.747	0	0	0	60.671.747
01	17	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.697.093.448	165.896.110	0	0	3.862.989.558

KOTA KENDARI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	18	2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	280.065.435	0	0	0	280.065.435
01	19	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.699.695.124	400.885.807	0	0	7.100.580.931
01	20	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.197.025.175	0	0	0	4.197.025.175
01	21	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12.411.784.087	79.072.626	0	0	12.490.856.713
01	22	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.184.869.803	333.092.929	0	0	6.517.962.732
01	23	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	55.074.431.366	4.018.749.002	0	0	59.093.180.368
01	24	4	02	SEKRETARIAT DPRD	53.838.140.889	1.632.404.461	0	0	55.470.545.350
01	25	5	01	PERENCANAAN	13.476.666.994	1.599.146.773	0	0	15.075.813.767
01	26	5	02	KEUANGAN	112.066.887.333	1.753.875.233	54.000.000.000	0	167.820.762.566
01	27	5	03	KEPEGAWAIAN	7.656.852.795	130.000.000	0	0	7.786.852.795
01	28	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.790.851.865	0	0	0	1.790.851.865
01	29	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	40.000.000	1.600.000.000	0	0	1.640.000.000
01	30	6	01	INSPEKTORAT DAERAH	15.480.078.654	279.049.418	0	0	15.759.128.072
01	31	7	01	KECAMATAN	100.161.938.628	6.866.548.117	0	0	107.028.486.745
01	32	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.035.323.722	68.023.061	0	0	14.103.346.783
03				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
03	01	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.604.794.603	253.540.000	0	0	7.858.334.603
03	02	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	223.090.129	11.230.810	0	0	234.320.939
04				EKONOMI					
04	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.093.158.184	54.605.894.901	0	0	63.699.053.085
04	02	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	669.918.052	0	0	0	669.918.052
04	03	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	421.233.375	0	0	0	421.233.375
04	04	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.900.082.381	6.922.316.765	0	0	11.822.399.146
04	05	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.552.122.105	553.583.259	0	0	8.105.705.364
04	06	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	2.610.052.438	0	0	0	2.610.052.438

KOTA KENDARI

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
				USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
04	07	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.716.838.569	140.000.000	0	0	1.856.838.569
04	08	2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	45.620.062	0	0	0	45.620.062
04	09	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.354.219.919	2.335.612.223	0	0	7.689.832.142
04	10	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.310.775.002	378.362.037	0	0	3.689.137.039
04	11	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.709.824.203	239.372.420	0	0	1.949.196.623
04	12	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.694.251.656	8.438.964.058	0	0	13.133.215.714
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.757.981.507	4.644.350.763	0	0	7.402.332.270
05	02	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	783.850.700	26.309.258.507	0	0	27.093.109.207
05	03	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.049.553.240	2.088.655.334	0	0	24.138.208.574
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57.200.000	48.335.341.871	0	0	48.392.541.871
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.555.583.351	10.355.525.023	0	0	13.911.108.374
07				KESEHATAN					
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	51.939.569.924	42.788.231.324	0	0	94.727.801.248
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.442.277.925	1.898.639.000	0	0	7.340.916.925
08				PARIWISATA					
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.956.977.484	4.095.774.915	0	0	7.052.752.399
10				PENDIDIKAN					
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	64.318.097.129	20.027.765.616	0	0	84.345.862.745

KOTA KENDARI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.553.542.300	1.499.975.500	0	0	10.053.517.800
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.612.621.425	0	0	0	1.612.621.425
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	116.483.897	0	0	0	116.483.897
11				PERLINDUNGAN SOSIAL					
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	427.250.145	0	0	0	427.250.145
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.376.972.845	49.560.000	0	0	1.426.532.845
TOTAL					1.159.021.517.111	282.154.962.614	54.000.000.000	0	1.495.176.479.725

Pj. Walikota Kendari





WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 Bulan September Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja.
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.558.239.942.749,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.484.020.985.157,-
b. Belanja Daerah	Rp. 1.495.176.479.725,-
Defisit/Surplus	Rp. (11.155.494.568,-)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 74.218.957.592,-
2. Pengeluaran	Rp. 63.063.463.024,-
Pembiayaan Netto	Rp. 11.155.494.568,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -----

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.484.020.985.157,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 392.865.124.550,- yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.130.000.000,-.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.455.438.215,-.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,-.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 141.279.686.335,-.

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.075.945.748.065,- yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 969.293.247.000,-.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 106.652.501.065,-

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.210.112.542,- yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. -----.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -----.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.210.112.542,-.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.495.176.479.725,- yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.159.021.517.111,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 672.811.975.281,-.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 418.227.618.509,-.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.164.642.634,-.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -----.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 44.169.480.687,-.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 647.800.000,-.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 282.154.962.614,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.549.258.507,-.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.240.826.222,-.
- (4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.082.960.086,-.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 125.034.829.949,-.

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.152.493.650,-.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.094.594.200,-.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000,- yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. ---- yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. -----.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -----.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 74.218.957.592,- yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.218.957.592,- yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.218.957.592,-.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -----.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. -----.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -----.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. ----.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. -----.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.063.463.024,- yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. -----.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -----.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.063.463.024,-.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -----.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. -----.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (11.155.494.568,-).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 11.155.494.568,-.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.




Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Kendari.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pj. & Pmbg.	
2	Ka. BKAD	
3	Kabag. Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 20~12~2022

Pj. WALI KOTA KENDARI


ASMAWA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20~12~2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


RIDWANSYAH TARIDALA

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR : 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023 :
5/115/2022**